



**ANALISIS KEMAMPUAN APARAT DINAS PENDAPATAN DAERAH  
DALAM PENETAPAN TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH  
DI KABUPATEN PINRANG**

**Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat  
yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana  
dalam jurusan Ilmu Politik Pemerintahan**

**G U F R A N  
E 121 02 007**



UPT	WISNUDDIN
Tgl. Pengantar	8-3-2007
Nama Pengantar	Fale Sogole
Alamat	1 (satu) ds
Tempat	H
No. Pengantar	112/8-3-7
No. File	SKR-507

GUR-a.

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2007**



## HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Gufran  
Nomor Pokok : E12102007  
Jurusan : Politik Pemerintahan  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

### JUDUL SKRIPSI

**Analisis Kemampuan Aparat Dinas Pendapatan Daerah Dalam Penetapan Target Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pinrang**

Konsultan I,



Drs. H. Rasvid Thaha, M.Si  
NIP: 131 414 619


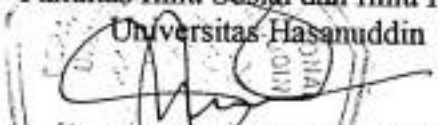
Konsultan II,



Drs. A. M. Rusli, M.Si  
NIP : 131 961 974

Mengetahui :

Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Hasanuddin



Dr. Armin Arsyad, M.Si  
NIP : 131 961 985

**HALAMAN PENERIMAAN  
TIM EVALUASI SKRIPSI/UJIAN KOMPREHENSIF**

Nama : Gufran  
Nomor Pokok : E 121 02 007  
Jurusan : Politik Pemerintahan  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Telah diterima oleh tim evaluasi skripsi/ujian komprehensif pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Politik Pemerintahan.

Makassar, 27 februari 2007

**TIM EVALUASI**


**Ketua** : Dr. Hasrat Arief Saleh, MS.

(  )

**Sekretaris** : Drs. Abdul Salam Muchtar

(  )

**Anggota** :- Drs. H. Rasyid Thaha, M.Si

(  )

- Drs. H. A. Syamsu Alam, M.Si.

(  )

- Drs. A. M. Rusli, M.Si

(  )

## ABSTRAKSI

**Gufran**, Analisis Kemampuan Aparat Dinas Pendapatan Daerah Dalam Penetapan Target Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pinrang, bertujuan untuk mengetahui Kemampuan Aparat Dinas Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan aparat dalam upaya peningkatan tersebut.

Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan metode penelitian yang didasarkan pada tipe penelitian deskriptif dengan dasar penelitian survey. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan terhadap beberapa responden sedangkan pengumpulan data diperoleh melalui dokumen atau arsip yang ada pada instansi yang terkait dengan masalah yang diteliti. Adapun teknik penarikan sample adalah purposive sampling dan analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif yang didukung oleh tabel frekuensi dari hasil tabulasi silang beberapa variabel yang relevan dengan tujuan penelitian.

Dari hasil penelitian data dan hasil analisa data menunjukkan bahwa :

1. Kemampuan aparat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang dalam Penetapan Target Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pinrang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : Latar belakang pendidikan jumlah atau kuantitas aparat, Usia dan Masa Kerja dan Kesesuaian Penempatan aparat dengan Disiplin Ilmu yang dimiliki.
2. Faktor- faktor yang mempengaruhi Kemampuan aparat Dinas Pendapatan Daerah dalam penetapan target Pendapatan Asli Daerah guna peningkatan pendapatan asli daerah adalah sarana dan prasarana, cara atau system penetapan target pendapatan asli daerah, volume pekerjaan atau kesejahteraan aparat.
3. Tindak lanjut dari hasil kemampuan aparat Dinas pendapatan daerah dalam penetapan target Pendapatan Asli Daerah, khusus didalam Latar Belakang Pendidikan, Usia dan Masa kerja serta kesesuaian Penempatan aparat dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh aparat sudah sesuai dengan pelaksanaan tugas-tugas sedangkan jumlah atau kuantitas aparat, sarana dan prasarana perlu adanya penambahan untuk memudahkan dan memperlancar urusan pemerintahan.

## ABSTRACT

**Gufra**, Analyse of the Officer Ability On Area Earnings Duty In Original Earnings Goals Stipulating of Pinrang Regency, aim to know the Officer Ability On Area Earnings Duty in the effort make-up of Area Original Earnings and to know the factors influencing officer ability in the effort the improvement.

To reach the target, writer use the research method which is relied by descriptive research type under colour of research survey. Primary Data collecting is conducted by through the interview with using questionnaire to some responder, in while obtained data collecting by through the document or archives in relevant institution with the accurate problem. As for technique of withdrawal sample is sampling purposive and data analyse is used by analysis qualitative supported by frequency tables from result of traverse which is relevant variable with the purpose of research.

From result of data research and result of data analysis indicate that :

1. Officer Ability On Area Earnings Duty of Pinrang Regency in Original Earnings Goals Stipulating of Pinrang Regency influenced by some factor theret is : Education background sum up or amount officer, age and year of service and According to Location officer with the Science Discipline owned.
2. Factor- factor influencing officer Ability On Area Earnings Duty in Original Earnings goals stipulating Area utilize the make-up of original earnings area is medium and premedium, way of or system of original earnings goals stipulating area, volume of work or prosperity officer
3. Follow Up from result of officer ability On area earnings duty in Original Earnings goals stipulating, special in Education Background, Age And Year of service and also of Location officer with the science discipline owned by officer have as according to duties execution while amount or amount officer, medium and premedium need the existence of addition to facilitate and to fluent of governance business.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Tulisan ini telah menandai adanya suatu kurun waktu dalam sejarah panjang perjalanan hidup penulis. Sebagai bahan dari suatu perjalanan yang masih sangat panjang, akhirnya penulis dapat mempersembahkan suatu tulisan sederhana dengan judul “ Analisis Kemampuan Aparat Dinas Pendapatan Daerah dalam Penetapan Target Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pinrang “.

Dalam rangka penyelesaian studi ini, penulis mendapat banyak motivasi, semangat yang sangat berharga dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itulah pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B, Sp.B.O, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Dr. Dedy Ticson, M.Sc, selaku Dekan Fisip UNHAS
3. Bapak Dr. Armin Arsyad M.Si dan Drs. H. A. Syamsu Alam, M.Si selaku Ketua Jurusan Politik Pemerintahan dan Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
4. Bapak Drs. H. Rasyid Thaha, M.Si dan Bapak Drs.A.M.Rusly,M.Si selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan Fisip Unhas yang telah membina dan memberi bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama berada di bangku perkuliahan.

6. Bapak Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang beserta aparatnya yang banyak membantu dan memberikan kemudahan kepada penulis selama melaksanakan penelitian di Daerah Kabupaten Pinrang.
7. Rekan-rekan **Interuption 02**, yang telah banyak menemani dan membantu penulis di bangku perkuliahan.
8. Saudara-saudaraku, Mubarak S.Ip, Amrullah S.Ip, Nur Mirham S.Ip, Azwar Haris S.Ip, Ustads Muh. Subhan Jaya S.Ip, Ahmad Kevin Jeto S.Ip, Haerul Hamka C.S.Ip, Azis (Kanda Junior), Ade S.Ip yang banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan telah lebih dulu melangkah ke Dunia Nyata.
9. Dinda Zuleyka Rivera Mendoza yang tak henti memberikan dukungan, motivasi serta cinta dan kasih sayang kepada penulis dalam penyelesaian studi penulis
10. Terkhusus bagi keluarga besar penulis utamanya orang tua penulis Alm. Ayahanda H. Ahmad Lutfi dan Ibunda Hj. Suhada, Kakak serta Adik-adikku (Anissah, Muhtar, Suhaeli, Alwana, Mutia) yang selalu senantiasa mencurahkan kasih sayang, dukungan serta doa restunya.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis yang tidak sempat saya sebut satu persatu. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas segala kebaikan dan jasa-jasa yang telah penulis terima. Semoga Allah SWT. membalas kebaikan kita semua, Insya Allah. Amin

Makassar, Februari 2007

Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI .....	iii
ABSTRAKSI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	8
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	9
1.4. Kerangka Konseptual .....	9
1.5. Metode Penelitian .....	12
1.5.1. Dasar dan Tipe Penelitian.....	13
1.5.2. Penentuan Populasi Dan Sampel.....	13
1.5.3. Teknik Pengumpulan Data.....	15
1.6. Defenisi Operasional .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
2.1. Pengertian Analisis.....	17
2.2. Kemampuan Aparatur .....	18
2.3. Aparatur Dinas Pendapatan Daerah .....	20
2.4. Pengertian Otonomi Daerah.....	23
2.5. Selayang Pandang Mengenai Sumber Pendapatan Asli Daerah .....	28
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI .....</b>	<b>32</b>
3.1. Sejarah dan Proses Kelahiran Kabupaten Pinrang .....	32
3.2. Keadaan Geografis .....	34



3.3. Kependudukan .....	37
3.4. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan daerah.....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
4.1. Kemampuan Aparat Dinas Pendapatan Daerah .....	55
4.1.1. Latar Belakang Pendidikan Aparat .....	56
4.1.2. Jumlah atau Kuantitas Aparat .....	59
4.1.3. Usia dan Masa Kerja .....	60
4.1.4. Kesesuaian Penempatan Aparat dengan Disiplin Ilmu yang Dimiliki .....	62
4.2. Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Target Pendapatan Asli Daerah.....	64
4.2.1. Sarana Prasarana yang tersedia .....	64
4.2.2. Sistem/cara Penetapan Target Pendapatan Asli Daerah .....	65
4.2.3. Volume Pekerjaan.....	69
4.2.4. Kesejahteraan Aparat.....	72
4.3. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang .....	74
4.3.1. Sumber-sumber Penerimaan .....	74
4.3.2. Target dan Realisasi Tahun Anggaran.....	81
4.3.3. Dasar Hukum Pelaksanaannya.....	82
4.3.4. Kemungkinan Pengembangannya.....	84
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>91</b>
5.1. Kesimpulan .....	91
5.2. Saran-Saran .....	93

**DAFTAR KUTIPAN**  
**DAFTAR KEPUSTAKAAN**  
**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<i>Teks</i>	<b>Halaman</b>
3.1	Rincian Data Curah Hujan Hari di Kabupaten Pinrang.....	37
3.2	Jumlah Penduduk Kabupaten Pinrang Tahun 2005.....	38
3.3	Jumlah Penduduk Menurut Umur.....	39
3.4	Komposisi Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas yang Bekerja.....	41
3.5	Komposisi Penduduk Menurut Agama.....	42
3.6	Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan per Kecamatan Kabupaten Pinrang.....	43
4.1	Tingkat Pendidikan yang Dimiliki Aparat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang.....	56
4.2	Hubungan Tingkat Pendidikan Formal Dinas Pendapatan Daerah dengan Pengetahuan dan Keterampilan yang dimiliki oleh Aparat....	57
4.3	Usia Aparat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang.....	60
4.4	Masa Kerja Aparat Dinas pendapatan Daerah kabupaten Pinrang.....	61
4.5	Hubungan Antara Umur/Usia dan Masa Kerja Aparat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang.....	61
4.6	Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Golongan Aparat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang.....	63
4.7	Sarana yang dimiliki Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang...	65
4.8	Keadaan Prasarana yang Ada di Daerah Kabupaten Pinrang.....	65
4.9	Fasilitas untuk Dinas Luar Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang	70
5.0	Fasilitas untuk Pekerjaan Rutin pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang.....	70

5.1	Hubungan Fasilitas untuk Dinas Luar dan Fasilitas yang Ada untuk Pekerjaan Rutin dengan Volume Pekerjaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang.....	71
5.2	Kepuasan Upah Pungut yang Diperoleh Aparat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang.....	72
5.3	Penghasilan Kerja yang Diperoleh Aparat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang.....	73
5.4	Hubungan Upah Pungut dengan Kesejahteraan yang diberikan pada Keluarga pada Aparat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang	73
5.5	Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2004 – 2006.....	76
5.6	Realisasi Penerimaan Retribusi Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2004 – 2006.....	78
5.7	Realisasi Hasil Penerimaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2004 – 2006.....	79
5.8	Penerimaan Lain-lain Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2004 – 2006	80
5.9	Pencapaian Rata-rata Pendapatan Asli Daerah kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2004/2006 hingga 2007/2007.....	82

# BAB I

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Sebagai Negara yang menganut asas desentralisasi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahannya, maka wilayah-wilayah Indonesia di beri wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah dimaksudkan sebagai suatu upaya sekaligus bentuk pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan Negara dalam masyarakat yang mempunyai sifat heterogenitas dalam dimensi yang luas. Dengan dasar pemikiran inilah yang kemudian melatar belakangi lahirnya ketentuan pasal 18 UUD 1945 yang menyatakan bahwa :

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa”.<sup>1)</sup>

Selanjutnya menurut penjelasan pasal 18 UUD 1945 menggariskan, bahwa :

“Oleh karena Negara Indonesia suatu “eenheidstaat” maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat staat juga. Daerah Indonesia akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil di daerah-daerah yang bersifat autonom (streek and locale rechte meenchapped) atau bersifat daerah administratif belaka, semua menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang”.<sup>2)</sup>

Implementasi dari pasal 18 UUD 1945, ditandai dengan lahirnya berbagai Undang-Undang yang mengatur pemerintahan daerah dan untuk menjalankan pemerintahan di daerah disesuaikan dengan perkembangan ketatanegaraan

Republik Indonesia maka dijabarkan ke dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Otonom Daerah, perlu memperhatikan hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keaneka ragaman daerah. Dengan demikian undang-undang merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah, sebagaimana tertuang dalam ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 disebut "Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah" yang pada dasarnya ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU No.32 Tahun 2004, sama dengan apa yang diatur dalam UU No.22 Tahun 1999. hanya saja UU No.32 Tahun 2004 lebih memperjelas dan mempertegas hal-hal yang telah diatur dalam UU sebelumnya tentang pemerintahan daerah, guna menutupi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam UU 22 Tahun 1999 dimaksud, terutama mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, antara provinsi dengan kabupaten/kota, Serta antara sesama daerah kabupaten/kota. Hubungan ini berkaitan dengan masalah kesatuan administrasi dan kesatuan wilayah.

Untuk penyelenggaraan Otonomi, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tidak relevan lagi digunakan. Undang-undang Nomor 32 mengalami

perubahan yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Dengan memperhatikan pengalaman penyelenggaraan otonomi daerah pada masa lampau yang menganut prinsip otonomi nyata dan bertanggung jawab dengan penekanan pada otonomi yang lebih merupakan kewajiban daripada hak, maka dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemberian kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan pada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Prinsip otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah

“1. Kewenangan Otonomi luas.

Daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan Pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

2. Otonomi yang Nyata

Otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

3. Otonomi yang Bertanggung Jawab

Otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional”.<sup>3)</sup>



Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan Otonomi Daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan Otonomi Daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar Daerah.

Agar Otonomi Daerah dapat dilakukan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Pemerintah wajib memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada Daerah agar dalam pelaksanaan Otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Atas dasar pemikiran di atas, prinsip-prinsip pemberian Otonomi Daerah yang dijadikan pedoman dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah :

1. Penyelenggaraan otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek Demokrasi, keadilan, Pemerintahan, serta potensi dan keaneka ragaman Daerah
2. Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada Otonomi yang Luas, Nyata, dan Bertanggung Jawab.
3. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota sedang Otonomi Daerah Provinsi merupakan otonomi yang terbatas
4. Pelaksanaan otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan Daerah serta antar - Daerah

5. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah Otonom, dan karenanya dalam daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak ada lagi Wilayah administratif.
6. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif Daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7. Pelaksanaan asas Dekonsentrasi diletakkan pada Daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah Administratif untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahan.
8. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari Pemerintah kepada Daerah, tetapi juga dari Pemerintah dan Daerah kepada Desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan".<sup>4)</sup>

Kedelapan faktor itulah yang menjiwai batang tubuh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan sekaligus pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Dalam penyelenggaraan otonomi di daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu diantaranya adalah faktor manusia pelaksana. Sebagai pelaksana yang dalam hal ini adalah aparatur Pemerintah Daerah, harus memiliki kemampuan yang dapat menunjang terlaksananya otonomi daerah sesuai dengan apa yang diinginkan karena bagaimanapun juga berhasil atau tidaknya pelaksanaan otonomi daerah akan sangat tergantung pada aparatur pemerintah daerah sebagai perencana, dan pengelola segala potensi yang ada dan bahkan menjadi pengawas dari kegiatan pemerintah itu sendiri khususnya aparat dinas pendapatan daerah guna meningkatkan pendapatan asli-daerah.

Untuk terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan UUD 1945, yang merupakan cita-cita seluruh rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaan

pemerintahan dan pembangunan di daerah diperlukan aparatur pemerintah yang memiliki kemampuan, bermental baik, disiplin tinggi, berwibawa, berdaya guna, berkualitas tinggi, dan sadar akan tanggung jawab.

Dalam GBHN 1988, ditegaskan sebagai berikut :

“Pembangunan aparatur pemerintah diarahkan untuk menciptakan aparatur yang lebih efisien, efektif, bersih, dan berwibawa, serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian pada masyarakat, bangsa dan negara. Dalam hubungan ini, kemampuan aparatur pemerintah untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan pembangunan perlu ditingkatkan mutu, kemampuan dan kesejahteraan manusianya, organisasinya dan tata kerja termasuk koordinasi serta penyediaan sarana dan prasarana”.<sup>5)</sup>

Berdasarkan penegasan tersebut, maka dalam pelaksanaan otonomi daerah kemampuan aparatur pemerintah dalam hal ini dinas pendapatan daerah merupakan suatu hal yang sangat penting karena salah satu indikatornya, berhasilnya suatu daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah sangatlah didukung oleh tingkat kemampuan aparturnya baik dalam melaksanakan tugas pemerintahan, maupun dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya.

Sebagai abdi masyarakat, seyogyanya apabila aparatur pemerintah baik yang berada di pusat maupun yang berada di daerah mampu menjalankan fungsinya sebagai pelaksana tugas pemerintahan dan pembangunan demi terciptanya masyarakat adil dan makmur, aparatur pemerintah dalam kedudukannya sebagai aparatur Negara diatur dalam UU No 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian yang ditegaskan sebagai berikut :

“Pegawai negeri adalah unsur aparatur Negara, abdi Negara, abdi masyarakat yang penuh kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945, Negara dan pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan”.<sup>6)</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dalam pelaksanaan otonomi daerah. Aparatur dinas pendapatan daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan perkembangan dan kebutuhan, disamping memberi pelayanan kepada masyarakat, aparatur dinas pendapatan daerah juga dituntut memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam mengembangkan daerah, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan dan pengelolaan pendapatan asli daerah.

Pengembangan struktur jabatan, penjenjangan karier yang jelas, pembagian tugas serta peningkatan kemampuan bagi aparatur dinas pendapatan daerah di daerah kabupaten yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sehubungan dengan penjelasan tersebut, maka dirasa perlu mengadakan penelitian guna mengetahui kemampuan aparatur dinas pendapatan daerah dan faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penetapan target pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penulis tertarik memilih topik otonomi daerah dalam penulisan skripsi ini dengan judul :

*“Analisis Kemampuan Aparatur Dinas Pendapatan Daerah Dalam Penetapan Target pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pinrang”.*

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam GBHN dijelaskan bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan daerah perlu dorongan dan ditingkatkan prakarsa dan partisipasi serta peran pemerintah daerah dalam pembangunan. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan aparat dengan sebaik-baiknya melalui sistem pembinaan dengan maksud dapat mendorong peningkatan kemampuan aparat secara efektif dan efisien khususnya aparat dinas pendapatan daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah.

Mengacu pada uraian tersebut diatas, maka dalam penelitian ini peneliti akan memberi batasan-batasan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kemampuan Aparatur Dinas Pendapatan Daerah dalam Penetapan Target Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pinrang?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi kemampuan aparat Dinas Pendapatan Daerah dalam Penetapan target pendapatan asli Daerah?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya penelitian dilakukan untuk mencapai suatu tujuan melalui berbagai kegiatan, begitu pula halnya penelitian yang penulis lakukan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kemampuan aparatur Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang dalam menetapkan target Pendapatan Asli Daerah.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Kemampuan Aparat dalam menetapkan target Pendapatan Asli Daerah.

### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah setempat dalam rangka menetapkan target Pendapatan Asli Daerahnya
- b. Dapat memberikan tambahan referensi bagi pihak-pihak yang berminat mendalami penulisan mengenai kemampuan aparat dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- c. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan

### **1.4. Kerangka Konseptual**

Pendayagunaan aparatur Dinas Pendapatan Daerah merupakan bagian dari pembangunan aparatur Dinas Pendapatan Daerah yang meliputi lembaga, tata kerja, dan aparat pemerintah daerah yang semata-mata diarahkan pada penyelenggaraan pemerintah daerah yang makin efektif, efisien dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta kemampuan dalam melaksanakan pembangunan diberbagai aspek kehidupan. Pendayagunaan aparatur pemerintah ditujukan pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah dan peningkatan kualitas aparat. Karena sebagai unsur pelaksana, aparatur Dinas



Pendapatan Daerah menduduki posisi vital dalam keseluruhan proses penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu, tindakan berlebihan bila dikatakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat tergantung pada aparatnya sebagai pengelola pendapatan asli daerah khususnya Dinas Pendapatan Daerah.

Berdasarkan dari pandangan dan pemikiran tersebut, maka dalam pelaksanaa Otonomi Daerah Kabupaten, aparatur Dinas Pendapatan Daerah dituntut untuk meningkatkan kemampuan perannya, baik dalam kedudukan, tugas dan fungsi serta kelembagaannya.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 disebutkan prinsip penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun prinsip tersebut yaitu :

- “1. Digunakannya asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan
2. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota; dan
3. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di Daerah Provinsi, daerah Kabupaten, Daerah Kota, dan Desa.”<sup>7)</sup>

Adapun pengertian dari asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 point (7,8) adalah:

- “1. Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.



2. Dekonsentrasi adalah Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.<sup>8)</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu pula diketahui kemampuan suatu daerah yang mempengaruhi beban tugas yang diselenggarakan untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif, karena keadaan daerah merupakan pencerminan potensi-potensi yang dapat menunjang pembangunan di segala bidang. Untuk memperjelas kemampuan suatu daerah maka pasal pasal 5 point (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa :

“Dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.”<sup>9)</sup>

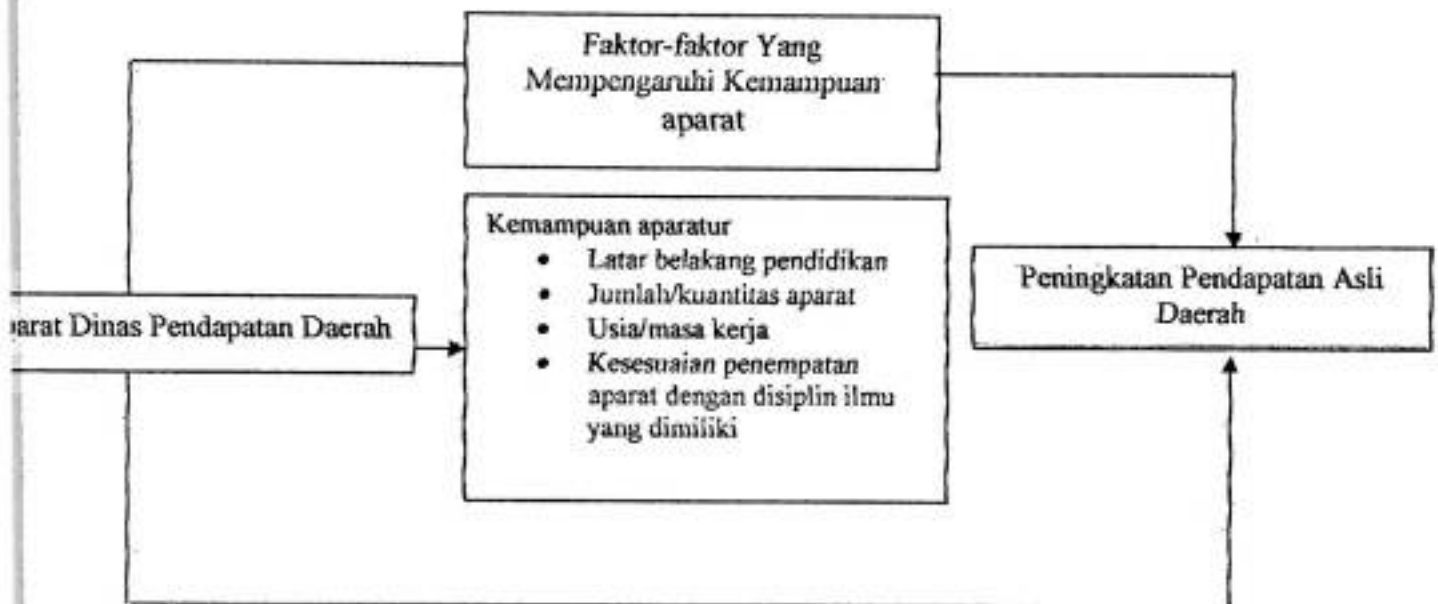
Mengingat kemampuan dan keadaan suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain : kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, yang kesemuanya merupakan komponen-komponen penting yang harus diperhatikan. Sejalan dengan uraian di atas maka dinas pendapatan daerah sebagai objek penelitian terus berupaya meningkatkan dan mengembangkan daerahnya dengan lebih optimal melakukan penekanan pada semua faktor yang menjadi



pendukung dalam peningkatan aparatnya guna meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

Melalui berbagai dinas yang diserahi tugas, terutama Dinas Pendapatan Daerah yang diserahi tugas dan tanggung jawab baik itu pelaksanaan administratif sampai pelaksanaan teknis pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Maka, pemerintah daerah pinrang berupaya merealisasikan target pendapatan yang ditetapkan untuk mencapai tingkat pendapatan asli daerah yang memadai guna menunjang terlaksananya pembangunan.

### Bagan Kerangka Konseptual



### 1.5 Metode Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dengan penulisan skripsi ini maka penulis menggunakan metode tertentu yang dapat mendukung

sehingga data dan informasi yang dikumpulkan mendekati nilai kebenaran yang obyektif.

### 1.5.1. Dasar dan Tipe Penelitian

Dasar penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah survey yaitu dengan terjun langsung ke obyek penelitian, sedangkan tipe penelitian deskriptif yaitu metode yang dapat menggambarkan hal-hal yang berkenaan dengan kemampuan aparat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang dalam penetapan target Pendapatan Asli Daerah.

### 1.5.2. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua aparat yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang sebagai pelaksana teknis pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dan juga aparat perencana target pendapatan asli daerah.

Jumlah responden pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang ditetapkan sebanyak 34 orang atau 100% dari populasi yang ada. Selain sampel tersebut di atas, dalam penelitian ini juga terdapat *informan* yang dapat dimintai keterangannya sebagai informasi pendukung, dengan komposisi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas Pendapatan Daerah	: 1 orang
b. Kepala Dinas Bappeda	: 1 orang
c. Kepala Bagian Penetapan Dinas Pendapatan Daerah	: 1 orang
d. Kasi Pendaftaran dan Pendataan	: 1 orang
e. Kaur Keuangan Dinas Pendapatan Daerah	: 1 orang
Jumlah	: 5 orang

### **1.5.3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data-data yang relevan dan akurat sehubungan dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan
2. Penelitian lapangan : yaitu cara pengumpulan data yang langsung pada obyek penelitian yang meliputi :
  - a. Wawancara : yaitu dengan mengadakan dialog atau komunikasi langsung dengan responden berkenaan dengan permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini
  - b. Observasi : yaitu dengan mengadakan pengamatan terhadap obyek penelitian
  - c. Kuisisioner : yaitu pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan.

### **1.5.4. Teknik Analisa Data**

Analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif yang didukung oleh tabel frekuensi dan hasil tabulasi silang beberapa variabel yang relevan dengan tujuan penelitian.

### **1.6. Definisi Operasional**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian ini, maka dalam definisi operasional ini peneliti akan mencoba menguraikan secara singkat inti yang terkandung dalam penelitian ini.

#### **1.5.4. Teknik Analisa Data**

Analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif yang didukung oleh tabel frekuensi dan hasil tabulasi silang beberapa variabel yang relevan dengan tujuan penelitian.

#### **1.6. Definisi Operasional**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian ini, maka dalam definisi operasional ini peneliti akan mencoba menguraikan secara singkat inti yang terkandung dalam penelitian ini.

Adapun pengertian kemampuan daerah menurut hemat penulis adalah usaha yang dilakukan oleh daerah untuk memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahannya secara berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan potensi yang dimiliki, baik itu potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alam.

Dalam penelitian ini, peneliti lebih memberikan penekanan pada kemampuan personil/aparat serta kemampuan sarana pendukung yang dimiliki Pemerintah Daerah khususnya Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang.

Untuk lebih jelasnya diuraikan indikator penting dari ketiga komponen tersebut :

- a. Kemampuan personil/aparat, indikator adalah :
  - Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh aparat
  - Jumlah atau kuantitas aparat
  - Usia dan masa kerja aparat

- Kesesuaian penempatan aparat dengan disiplin ilmu yang dimiliki
- b. Faktor yang mempengaruhi kemampuan aparat dalam penetapan target Pendapatan Asli Daerah?

Adapun sumber pendapatan asli daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 pasal 6 ayat 1 adalah :

“Sumber pendapatan daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan asli daerah yaitu :
  1. Hasil pajak daerah
  2. Hasil retribusi daerah
  3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain berupa bagian laba dari BUMD, hasil kerja sama dengan pihak ketiga ;
  4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- b. Dana perimbangan ;
- c. Pinjaman Daerah; dan
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah<sup>10)</sup>

Seperti yang telah diuraikan dalam rumusan masalah, pendapatan daerah ini dibatasi khusus pada pendapatan asli daerah dengan penekanan pada masalah pendapatan asli daerah tersebut, dengan indikator sebagai berikut :

- Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang dikelola
- Target dan realisasi per tahun anggaran
- Dasar hukum pelaksanaannya
- Kemungkinan pengembangan

# BAB II



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pengertian Analisis

Menurut Suwardjoko Warpani dalam bukunya "Analisis Kota dan Daerah" dijelaskan bahwa : " Analisis adalah uraian mengenai arti suatu keadaan data atau keterangan suatu keadaan yang diuraikan dan diselidiki hubungan satu sama lain diselingi keadaan yang ada antara satu dengan yang lainnya ".<sup>11)</sup>

Di bagian lain dijelaskan pula bahwa analisa adalah : " penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui penyebabnya dan bagaimana perkaranya". Dalam suatu analisa diharapkan adanya suatu kesimpulan yang akan digunakan sebagai pegangan tindakan selanjutnya juga dapat diketahui dan dinilai potensi dan masalah yang akan dibahas sehingga dapat dipilih serangkaian alternatif tindakan guna memecahkan masalah yang akan dihadapi. disamping itu dapat pula diperhitungkan akibat berantai dari suatu tindakan tertentu.

Analisis sebagai suatu tindakan intelektual haruslah bersifat empiris, tidak bias, rasional dan handal. Analisa ,mesti bersifat empirik dalam arti penilaian penilaian yang kita kita lakukan tidak boleh hanya bersifat spekulatif tetapi harus diuji atau dibuktikan dengan valid. Jadi pendekatan pendekatan yang digunakan adalah analisis, observasi, riset, dan berdasarkan obyektifitas, dengan metodologi yang validitas datanya dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam menganalisa sesuatu ada beberapa alternatif yang tersedia, yang hasilnya nanti adalah penilaian kita terhadap alternatif yang paling tepat. Oleh

karena itu, dalam menganalisis kita tidak boleh memihak terhadap suatu alternatif dan dipihak lain validitas hasil analisis haruslah tetap dijaga.

Untuk memperjelas uraian tentang analisis, berikut akan dikemukakan usaha penentuan suatu analisis, yaitu : Data yang tersedia harus lengkap dan terperinci, maka analisis dilakukan dengan teliti. Tujuan analisis, tidak semua hal memerlukan analisis terperinci sampai hal yang sangat mendetail, bahkan kadang-kadang cukup dengan garis besarnya saja, hal ini tidak mengurangi kelengkapan data.

Teknik analisis, penggunaan atau penilaian teknik analisis yang tepat akan membantu kehalusan penulisan. Maka dapat disimpulkan bahwa menganalisis merupakan hal yang sulit karena harus mengetahui keadaan yang dianalisis, juga harus tersedia data yang lengkap mampu dikaitkan antara satu dengan yang lain.

## **2.2. Kemampuan Aparatur**

Istilah kemampuan berasal dari kata "mampu" yang berarti kuasa (sanggup, bisa) melakukan sesuatu. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kemampuan diartikan sebagai kesanggupan; kecakapan; kekuatan".<sup>12)</sup>

Jadi secara umum, kemampuan diartikan sebagai segala daya dan potensi yang dimiliki oleh manusia dalam melakukan suatu aktifitas. Jadi yang dimaksud dengan kemampuan aparatur adalah segala daya dan potensi yang dimiliki oleh aparat pemerintah, pegawai negeri, abdi Negara dan abdi masyarakat dalam menjalankan atau melaksanakan tugas dan fungsinya.

Aparatur pemerintah sebagai abdi Negara berarti harus melaksanakan kewajiban mewujudkan tujuan nasional seperti yang tercermin dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat. "Sedangkan sebagai abdi masyarakat, aparatur pemerintah harus dapat mendengarkan, menghimpun, dan menelusuri setiap aspirasi dan keinginan masyarakat untuk kemudian disalurkan kepada pemerintah."<sup>13)</sup>

Dengan melihat tugas aparatur pemerintah tersebut, jelas bahwa aparatur pemerintah dalam menjalankan fungsinya mempunyai tugas ganda yaitu mengabdikan kepada kepentingan Negara dan masyarakat. Dalam pelaksanaan penetapan target dan pengelolaan pendapatan asli daerah, aparatur dinas pendapatan daerah sebagai bagian dari pemerintah daerah juga turut bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berada dalam wilayah kerjanya khususnya pengelolaan dan penetapan target pendapatan asli daerah.

Sejalan dengan itu, maka pendayagunaan aparatur dinas pendapatan daerah perlu terus ditingkatkan, terutama yang berkaitan dengan kualitas, efisiensi pelayanan, dan pengayoman kepada masyarakat serta kemampuan profesional. Oleh karena itu, aparatur dinas pendapatan daerah yang merupakan bagian dari sumber daya manusia Indonesia, harus menjadi prioritas utama untuk dibina dan ditingkatkan kemampuan profesionalismenya, agar dapat menjadi tenaga yang handal dan mampu berperan sebagai penggerak swadaya sehingga secara sinergis bersama masyarakat dapat melaksanakan pembangunan dengan memanfaatkan sumberdaya di wilayahnya.

## 2.2 Aparatur Dinas Pendapatan Daerah

Sebelum mengemukakan lebih jauh apa yang dimaksud dengan aparatur pemerintah khususnya aparatur dinas pendapatan daerah, maka terlebih dahulu akan dibahas "aparatur" Dinas Pendapatan Daerah ". Aparatur berasal dari kata " aparat " yang berarti badan, alat, instansi, pegawai negeri. Istilah aparatur tidak boleh disamakan dengan aparatur pemerintah ataupun aparatur Negara, karena esensi ketiganya berbeda.

Menurut Drs. Soewarno Handyaningrat, mengemukakan bahwa :

1. Aparatur adalah aspek-aspek administrasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan atau Negara sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional.
2. Aparatur pemerintah adalah orang-orang yang menduduki jabatan dalam kelembagaan pemerintahan (eksekutif), yang meliputi : Pejabat Negara sipil dan daerah, Aparatur perekonomian Negara, pegawai negeri yang bertugas pada pemerintah desa/kelurahan.
3. Aparatur Negara adalah orang - orang yang menduduki jabatan dalam kelembagaan yaitu mereka yang bertugas dalam kelembagaan pemerintahan (badan eksekutif), kelembagaan perwakilan (badan legislatif) dan lembaga Negara tertinggi lainnya".<sup>14)</sup>

Di dalam pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1974, dikatakan bahwa :

"Pegawai negeri adalah unsur aparatur Negara, abdi Negara, abdi masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintahan".<sup>15)</sup>

Selanjutnya di dalam penjelasan umum Undang – undang No. 8 Tahun 1974 menyebutkan bahwa :

"Sebagaimana terlihat sepanjang sejarah, maka kedudukan dan peranan pegawai negeri adalah penting dan menentukan, karena pegawai negeri adalah unsure aparatur Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional".<sup>16)</sup>

Berdasarkan rumusan tersebut diatas, jelas terlihat betapa pentingnya peranan dan kedudukan pegawai negeri sebagai unsur aparatur Negara. pembangunan aparatur pemerintahan dalam GBHN 1988 dengan tegas diarahkan untuk :

“Menciptakan aparatur yang lebih efisien, efektif, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya dilandasi semangat dan sikap pengabdian pada masyarakat, bangsa dan Negara”.<sup>17)</sup>

Selanjutnya dikatakan bahwa “pembinaan penyempurnaan dan pendayagunaan aparatur pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah perlu dilakukan secara terus menerus sehingga dapat meningkatkan kemampuan, pengabdian, disiplin, keteladanannya. Sejalan dengan itu, aparatur pemerintah khususnya aparat dinas pendapatan daerah harus mampu melayani, mengayomi, serta menumbuhkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta tanggap terhadap pandangan dan aspirasi yang hidup dalam masyarakat”.<sup>18)</sup>

Dinas Pendapatan Daerah adalah suatu badan yang memiliki wewenang untuk mengelola, merencanakan target pendapatan asli daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah adalah sebagai organ (alat) yang menjalankan tugas (fungsi). Pemerintah dalam arti sempit adalah mereka yang memegang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Organ pelaksana tugas pemerintahan tersebar dalam wilayah kekuasaan Negara yang secara hirarki berada dalam tingkat pemerintahan daerah (Sudirwo, 1980)<sup>19)</sup>.

Pamudji S, menyatakan bahwa pemerintah adalah kekuasaan memerintah suatu Negara (seperti Kabinet merupakan suatu pemerintah).<sup>20)</sup> sedangkan Thalididhuhu memberi definisi terhadap konsep pemerintah sebagai aparat atau badan yang mengeluarkan atau memberi perintah.<sup>21)</sup>

Bayu Surianingrat, mengemukakan bahwa pemerintah adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan.<sup>22)</sup> Selanjutnya Soewarno Handyaningrat berpendapat bahwa pemerintah adalah badan yang menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, pemerintah adalah badan eksekutif dalam pelaksanaan tugasnya mendapat pengawasan dari badan legislatif.<sup>23)</sup>

Wilson dalam Ateng, menyatakan bahwa pemerintah adalah sesuatu kekuatan yang diorganisir. Tidak perlu diorganisir oleh angkatan bersenjata, tetapi pemerintah itu adalah hasil perbuatan dari beberapa orang atau suatu organisasi untuk merealisasikan maksud-maksudnya bersama referensi-referensinya (hal-hal yang dapat memberikan keterangan-keterangan pada persoalan-persoalan umum atau pada masyarakat).

Masih dalam Ateng, Yamin berpendapat bahwa pemerintah adalah jawatan atau aparatur dalam susunan politik. Pemerintah juga adalah lembaga atau kumpulan lembaga, dimana suatu masyarakat yang merdeka membuat dan mengerjakan peraturan-peraturan tentang perbuatan yang diperlukan untuk memungkinkan manusia untuk hidup dalam suatu Negara sosial, atau yang dibuat manusia yang membentuk masyarakat itu, oleh mereka yang mempunyai



kekuasaan atau pemerintah yang mengatur mereka. Pemerintah adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan dari suatu masyarakat.<sup>24)</sup>

Pada hakekatnya aparatur pemerintah adalah pegawai negeri, pegawai Negara, pejabat Negara yang merupakan abdi Negara dan abdi masyarakat. Sebagai abdi Negara berarti sebagai pelaksana dari semua tugas Negara yang dibebankan kepadanya, dan sebagai abdi masyarakat berarti segenap pelaksanaan tugas tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan segenap lapisan masyarakat, sesuai bidang tugasnya masing-masing dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif. Sebagai contoh Dinas Pendapatan Daerah memiliki wewenang dan tugas dalam hal pengelolaan dan perencanaan target pendapatan asli daerah.

#### **2.4. Pengertian Otonomi Daerah**

Secara etimologi perkataan otonomi berasal dari bahasa latin "autos" yang berarti sendiri dan "nomos" yang berarti aturan. Dengan demikian otonomi berarti mengatur sendiri.

Dikalangan para ilmuwan dan praktisi pemerintahan banyak mengutarakan pendapatnya tentang "otonomi". Misalnya : RDH. Koesumahatmadja, mengatakan "menurut perkembangan sejarah di Indonesia, otonomi itu selain mengandung arti perundangan, mengandung pula arti pemerintahan".<sup>25)</sup> Syarif Saleh mengatakan bahwa "otonomi itu sebagai hak mengatur dan memerintah daerah sendiri, atas inisiatif dan kemauan sendiri, hak mana diperoleh dari pemerintah pusat".<sup>26)</sup>



F. Sugeng Istanto berpendapat bahwa "otonomi diartikan sebagai hak atau wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah".<sup>27)</sup> Selanjutnya Wayong mengemukakan "otonomi daerah itu adalah kebebasan untuk memelihara dan mengajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri dan pemerintahan sendiri".<sup>28)</sup>

Sementara itu Ateng Syafruddin mengatakan "istilah otonomi mempunyai makna kebebasan yang terbatas atas kemandirian tetapi bukan kemerdekaan, kebebasan yang terbatas atas kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan".

Dari rumusan berbagai pendapat diatas, maka pada dasarnya semua melihat bahwa otonomi diartikan sebagai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sedang pengertian daerah dalam kamus bahasa Indonesia adalah lingkungan suatu pemerintahan (kekuasaan). Sementara J. Wayong mendefinisikan "daerah" sebagai berikut :

"Daerah adalah badan hukum publik sebagai wadah pemerintahan daerah atau organisasi pemerintahan sederah yang disebut propinsi/kotamadya (daerah tingkat I), kabupaten/kotamadya (daerah tingkat II), dan kecamatan/kotamadya (daerah tingkat III)".<sup>29)</sup>

Dengan demikian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Yang diatur dan diurus tersebut adalah tugas-tugas atau urusan-urusan tertentu yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk diselenggarakan sesuai dengan keijaksanaan, prakarsa, dan kemampuan sendiri.<sup>30)</sup>

Otonomi daerah dapat dipandang sebagai cara untuk mewujudkan secara nyata penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, dan berwibawa guna mewujudkan pemberian pelayanan kepada masyarakat.<sup>31)</sup>

Selanjutnya pengertian otonomi daerah semakin diperjelas dalam UU No. 32 tahun 2004, pasal 1 poin 5, yaitu :

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.<sup>32)</sup>

Dengan berpedoman pada pengertian otonomi daerah yang ada, maka jelas bahwa otonomi daerah merupakan suatu pengakuan secara yuridis formil dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri.

Dalam keputusan dikenal ada tiga konsep tentang otonomi daerah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bayu Suryaningrat yaitu :

- “1. Otonomi Material : urusan yang diserahkan menjadi urusan rumah tangga  
    Urusan terperinci secara tegas, pasti, diberi batas-batas (limitative), dan dalam prakteknya penyerahan ini dilakukan dalam pembentukan daerah yang bersangkutan.
2. Otonomi Formal : kebalikan dari otonomi Material, urusan yang diserahkan tidak dibatasi. Daerah mempunyai kebebasan untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang menurut pandangan adalah kepentingan daerah. Batasnya adalah bahwa daerah tidak boleh mengatur urusan yang lebih tinggi, selain

dari pada itu peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.

3. Otonomi Riil : sistem ini dapat dikatakan kombinasi atau campuran otonomi material dan otonomi formal. Di dalam undang-undang pembentukan daerah, pemerintah pusat menentukan urusan-urusan yang dijadikan pangkal mengatur rumah tangga daerah".<sup>33)</sup>

Pemberian otonomi kepada daerah haruslah senantiasa didasarkan kepada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan otonomi daerah sehingga dapat tetap menjamin penyelenggaraan sistem pemerintahan yang ideal, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, pemerataan pembangunan dan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan, sebagaimana yang terdapat dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Menurut Marzuki Nyakman dan M. Ryaas Rasyid, satu hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu bahwa untuk mengukur kemampuan penyelenggaraan otonomi suatu daerah, ada lima variabel pokok yang dipergunakan yaitu :

1. Kemampuan keuangan daerah, nilainya ditentukan oleh berapa besar peranan pendapatan asli daerah terhadap jumlah (total) pembiayaan daerah.
2. Kemampuan aparatur, beberapa rasio jumlah pegawai terhadap jumlah penduduk, masa kerja pegawai, golongan kepegawaian, pendidikan formal dan pendidikan fungsional aparat.

3. Partisipasi masyarakat, bagaimana prinsip asli masyarakat dalam pembangunan desa yang menyangkut kesehatan dan pelayanan social.
4. Kemampuan ekonomi, dengan mengukur indikator seperti nilai rata-rata pendapatan perkapita, beberapa persentase sektor-sektor pertanian, pertambangan, dan pemerintahan terhadap pembangunan daerah.
5. Kondisi demografi, indikasi adalah berapa pendapatan penduduk, pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk yang buta aksara, ratio ketergantungan tempat pendidikan penduduk, usia muda, pendidikan yang diutamakan dan kemungkinan tersedianya lapangan kerja.<sup>34)</sup>

Menurut Yosef Rihu Kaho, suatu daerah untuk dapat disebut sebagai daerah otonom haruslah memiliki atribut sebagai berikut :

1. Mempunyai urusan tertentu yang urusan rumah tangga daerah, urusan rumah tangga ini merupakan urusan yang diserahkan pemerintah pusat kepada daerah.
2. Urusan rumah tangga ini diatur dan diurus/diselenggarakan atas inisiatif/prakarsa dan kebijaksanaan daerah itu sendiri.
3. Untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangga itu sendiri yang terpisah dari aparat itu sendiri yang terpisah dari aparat pemerintah pusat, yang mampu untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya.

4. mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat menghasilkan pendapatan yang cukup, agar dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga daerahnya.<sup>35)</sup>

Sementara Sugeng dalam Solly Lubis mengatakan, bila hubungan pemerintah pusat dan daerah hendak dilaksanakan dalam kerangka UUD 1945 yang menentukan Negara Indonesia sebagai Negara kesatuan serta hendak pula disesuaikan dengan keadaan yang ada, maka asas pemerintahan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya.<sup>36)</sup>

Dengan melihat dan mencermati berbagai pendapat mengenai otonomi daerah, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan kemampuan dan atribut yang melekat pada daerah tersebut : jumlah urusan diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah, kemampuan aparatur, kebijaksanaan daerah, sumber-sumber keuangan, dan berbagai factor lainnya dengan berbagai pada konsep otonomi yang nyata dan bertanggung jawab yang didasarkan pada prinsip-prinsip otonomi daerah.

## **2.5 Selayang Pandang Mengenai Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Sumber diperolehnya dana bagi pemerintah daerah dapat bermacam-macam hal ini ditegaskan dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 157, yang telah dikutip pada Bab I dan Undang-undang Nomor 33 Tahun

2004 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah, pasal yaitu :

“Sumber-sumber pendapatan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi adalah :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain pendapatan”.<sup>37)</sup>

Selanjutnya mengenai sumber pendapatan Asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (a), menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157 huruf (a) yaitu :

“Pendapatan Asli Daerah yaitu :

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang sah”.<sup>38)</sup>

Terhadap sumber-sumber pendapatan asli daerah, UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dapat dijadikan acuan untuk penjelasan selanjutnya. Untuk lebih jelasnya berikut pengertian tentang sumber pendapatan asli daerah.

1. Pajak Daerah, banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang memberi pengertian atau definisi tentang pajak. seperti pendapat Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale balik yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.<sup>39)</sup>

Khusus pajak daerah, D.J. Mamesah, mengutip pasal 2 UU Darurat

No. 11 Tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah, yaitu :

“Pajak Daerah ialah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk membiyai rumah tangganya sebagai badan hukum politik “. <sup>40)</sup>

Selanjutnya menurut UU No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 1 point 6 dijelaskan bahwa :

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi adan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiyai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah”. <sup>41)</sup>

Dari pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak daerah adalah pajak Negara yang diserahkan kepada daerah untuk di pungut berdasarkan aturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiyai pengeluaran daerah sebagai badan hukum public.

2. **Retribusi Daerah**, pengertian retribusi daerah seperti yang terdapat dalam UU No. 18 Tahun 1997 pasal 1 point 26 mengatakan “bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan “. <sup>42)</sup>
3. **Lain-lain Pendapatan Daerah**. Masih ada kemungkinan pendapatan daerah yang dapat diperoleh dari sumber-sumber lain yang sah, yang tidak berupa



pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan maupun dinas-dinas daerah. Misalnya penerimaan uang oleh pemerintah yang berupa hasil penjualan.

4. Sumbangan, bahwa disebabkan oleh keadaan luar biasa daerah mengalami kekurangan keuangan dalam anggaran keuangannya. Daerah demikian akan mendapat sumbangan dari pos luar biasa. Pemberian diadakan pengawasan mendalam atas daerah atas daerah itu. Sumbangan sebagaimana pasal 9 UU No. 32 1956 adalah bantuan yang diberikan kepada daerah untuk menutup kekurangan anggaran keuangan luar biasa yang mengakibatkan daerah mengalami kesulitan keuangan.

# BAB III

## BAB III

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 3.1. Sejarah dan proses kelahiran kabupaten Pinrang

Pada zaman penjajahan, Belanda yang menjalankan politik adu domba di kerajaan Sawitto menekankan tiga pernyataan pokok yang harus dilakukan oleh orang-orang Sawitto yang dikenal dengan *Karte Valering* yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa raja yang bersangkutan takluk kepada kepada raja belanda dan kerajaan sawitto dibawah kekuasaan oleh kerajaan Hindia Belanda sehingga harus taat dan patuh kepada raja Belanda dan wakilnya termasuk gubernur Hindia Belanda.
2. Bahwa raja yang bersangkutan tidak akan mengadakan hubungan kenegaraan dengan kekuasaan-kekuasaan asing, musuh Belanda adalah musuhnya, sahabat Belanda adalah sahabatnya
3. Bahwa Raja yang bersangkutan akan mentaati segala segala peraturan mengenai negerinya yang ditetapkan oleh raja Belanda maupun oleh gubernur Hindia Belanda.

Selama penjajahan Belanda di Pinrang ibukota kerajaan yang berdampingan dengan kerajaan lain disekitarnya mempunyai status Swapraja. Hal ini berarti bahwa kerajaan Sawitto tidak lagi berstatus sebagai sebuah bentuk kerajaan yang berdaulat akan tetapi Pinrang sebagai sebuah ibukota

kerajaan Sawitto statusnya sebagai swapraja atau Kabupaten. Pada masa penjajahan jepang tahun 1942 keadaan kerajaan dan rakyatnya mengalami kondisi yang memprihatinkan, kecuali dengan eksistensinya kerajaan Sawitto tetap diakui sebagai kerajaan dengan Ibukota Pinrang. Pada tanggal 15 Agustus 1945. Jepang menyerah kalah pada sekutu dan menyerahkan kembali tumpuk kekuasaan pada kerajaan Sawitto dalam bentuk tiga Swaparaja Sawitto, Swapraja batulappa, Swapraja Kassa.

Ketika Pinrang merupakan Onder-Afdeling di bawah Afdeling Parepare Afdeling ketujuh di Sulawesi Selatan dan Ketetapan PP No. 34/ 1952 Tentang perubahan Sulawesi Selatan, pembagian wilayah menjadi Swatantra, pertimbangan di untkapkannya ketetapan tersebut adalah memenuhi keinginan rakyat dan memperbaiki susunan penyelenggaraan pemerintah.

Daerah Swatantra yang dibentuk adalah sama dengan wilayah afdeling yang ditetapkan oleh keputusan Gubernur Timur Besar (Grote Goste) pada tanggal 24 Juni 1940 no. 21 kemudian diubah oleh keputusan Gubernur sulawesi Selatan Nomor 618/199. Adapun perubahannya adalah kata Afdeling diubah menjadi daerah Swatantara, dan Onder Afdeling menjadi Kewedanan. Dari perubahan Order-Afdeling Pinrang dirubah menjadi Kewedanan Pinrang yang dibawah tuga Swapraja dan distrik dengan status demikian inilah maka pemerintah senantiasa mengalami pasang surut. Upaya untuk memperbaiki struktur pada penyelenggaraan pemerintah maka keluarlah suatu undang-undang yang dikenal dengan nama Undang-undang No. 29/1959 yang berlaku

pada tanggal 4 Juli 1959 Tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi Selatan termasuk Pinrang.

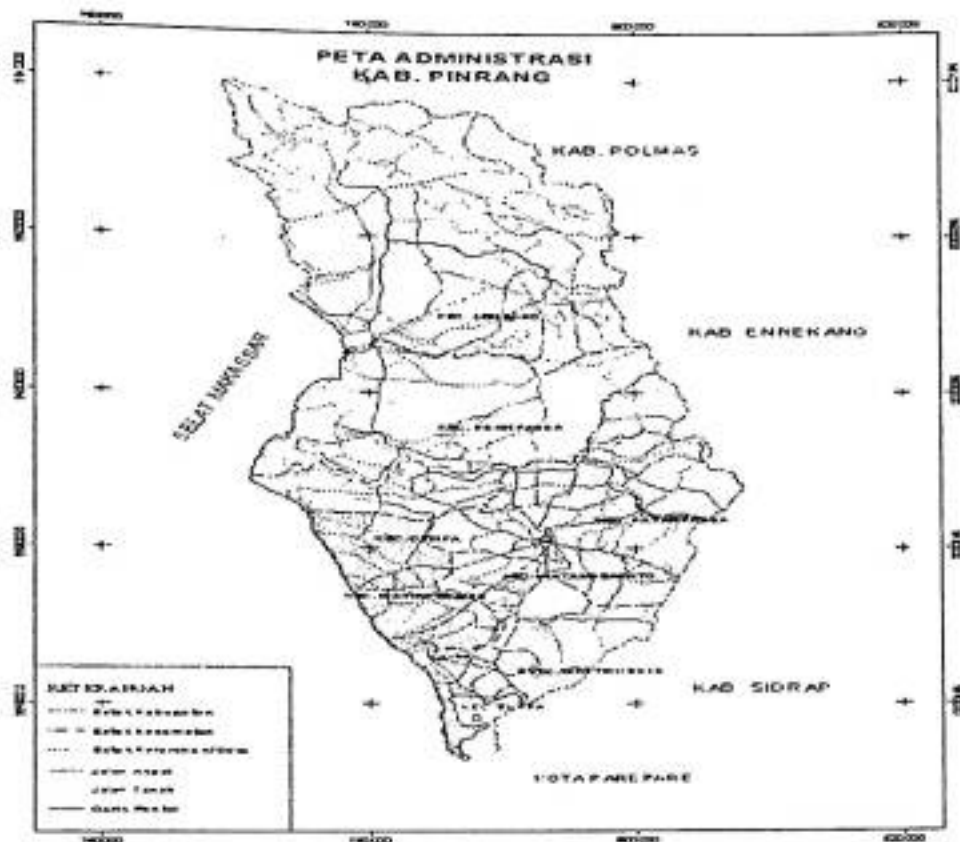
Setelah keluarnya SK Mendagri No. UP-7/3/5-392 tanggal 8 Januari 1960 yang menunjuk H. A Makkulau menjadi kepala daerah Pinrang pada tanggal 16 Februari 1960. Hari pelantikan tersebut menjadi patokan hari lahirnya kabupaten Pinrang (Pemda Kabupaten Pinrang 2002).

### 3.2 Keadaan Geografis

#### a. Letak dan batas Wilayah

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu kab/kota yang ada di Sulawesi selatan berada pada bagian tengah propinsi Sulawesi Selatan yang terletak pada posisi  $40^{\circ}10'30''-30^{\circ}01'13''$  LS dan  $119^{\circ}026'30''-119^{\circ}047'20''$  BT dengan batas wilayah :

Sebelah Utara	: Kabupaten Toraja
Sebelah Timur	: Kabupaten Enrekang dan Sidenreng Rappang
Sebelah Selatan	: Kotamadya Pare-pare
Sebelah Barat	: Kabupaten Polewali dan Selat Makasar



b. Luas Wilayah dan Administrasi Pemerintahan

Luas daerah Kabupaten Pinrang 1.961,77 Km<sup>2</sup>. pada tahun 2004 secara administrasi pemerintahan kabupaten pinrang terbagi menjadi 12 kecamatan yang terdiri dari 103 desa/kelurahan.

c. Ketinggian.

Berdasarkan ketinggian dari permukaan laut yang bervariasi antara 0-2000 m dari permukaan laut, yaitu (0-49 m) : 434,29 Km<sup>2</sup> (10,10%) lebih dari 400 m : 1122,69 Km<sup>2</sup> (57,23%).

d. Iklim dan curah hujan

Kabupaten Pinrang berdasarkan klasifikasi schimidt dan ferguson (1951) beriklim tropis tipe : A,B,C2,C2,DI dan E1. Temperatur rata-rata harian berkisar antara  $20^{\circ}$  C sampai  $34^{\circ}$  C terendah pada pagi hari pukul 06.00-07.00 dan tertinggi pada siang hari pukul 13.00-14.00.

Sebagai daerah yang terletak dalam daerah tropis, sebagaimana daerah wilayah Indonesia pada umumnya juga mengenal dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim kemarau biasanya terjadi antara bulan april-oktober sedangkan musim hujan antara bulan november-maret setiap tahunnya. Curah hujan pada daerah daratan relatif lebih rendah dibandingkan dengan daerah pegunungan masih terdiri dari kawasan hutan yang masih lebat, suatu kondisi gunung-gunung agak tinggi sehingga memungkinkan turunnya curah hujan yang lebih tinggi. Curah hujan berkisar 1000-2000 mm/tahun, sedangkan hari hujan bervariasi antara 90-160 hari hujan/tahun. Secara hidrologis di daerah ini terdapat banyak sungai dan anak sungai yang panjangnya bervariasi. Keberadaan sungai-sungai tersebut sesuai dengan kondisi geografi dan fotografi daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai pengatur, sumber olahan PLTA dan pengairan. Perincian data curah hujan dan hari dapat dilihat dari table 3.1 berikut



Tabel 3.1

## Rincian Data Curah Hujan Hari Di Kabupaten Pinrang

No	Bulan	2000		2001		2002	
		Curah	Hari	Curah	Hari	Curah	Hari
1	Januari	266	11	150	19	289	9
2	Februari	132	11	163	18	144	7
3	Maret	192	13	198	21	361	13
4	April	152	12	373	25	137	9
5	Mei	175	8	229	24	193	8
6	Juni	101	17	165	19	138	5
7	Juli	134	15	327	20	114	6
8	Agustus	0	0	168	16	8	1
9	September	0	0	123	12	45	4
10	Oktober	56	0	170	13	286	16
11	Nopember	81	23	231	14	95	2
12	Desember	144	12	138	11	336	15

Sumber: hasil olahan data Sekunder 2005

### a. Kependudukan

#### a. Penduduk

Penduduk kabupaten pinrang hampir 100% merupakan suku Bugis. Hal ini dapat di dengar dari percakapan sehari-hari masyarakat menggunakan bahasa Bugis serta dapat dilihat dari adat-istiadat yang mereka pergunakan. Penduduk selain sebagai subyek juga sekaligus sebagai objek dari semua bidang pembangunan. Oleh karenanya aspek kependudukan harus selalu menjadi pertimbangan utama dalam setiap perencanaan pembangunan. Untuk

itu diperlukan data penduduk yang mutakhir baik informasi mengenai kuantitas, komposisi, sebaran dan perkembangannya. Untuk lebih jelas jumlah penduduk kabupaten Pinrang dapat dilihat dari Tabel 3.2 berikut ini :

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Penduduk Kabupaten Pinrang Tahun 2005**

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Keterangan
		Pria	Wanita	
1	Suppa	13048	14235	27283
2	Mattiro Somp	12530	13758	26288
3	Mattiro Bulu	11469	12999	24468
4	Watang Sawitto	25360	27815	53175
5	Patampanua	15522	16876	32298
6	Cempa	7557	8275	15832
7	Duampanua	10511	3754	24265
8	Lembang	18208	18907	37115
9	Lanriseng	7701	8698	16399
10	Tiroang	873	7725	16428
11	Paletang	7000	9000	15000
12	Batulappa	11205	8255	19460
	Jumlah	148354	160297	308651

Sumber : *Olahan Data Sekunder 2005*

Kabupaten Pinrang dengan penduduknya yang hampir 100% adalah suku bugis, hal ini merupakan faktor yang menguntungkan karena dengan penduduk yang seperti itu akan muda dalam dan memahami perubahan-perubahan yang terjadi. Apalagi apabila penduduk tersebut di barengi

dengan kualitas sumber daya yang prima, dengan demikian akan menjadi sumber daya potensi untuk pembangunan.

Dari jumlah penduduk diatas juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk dengan jenis kelamin wanita lebih besar dibandingkan dengan jenis kelamin pria. Jumlah penduduk wanita sebesar 160. 297 jiwa atau sekitar 49,3% dari jumlah penduduk kabupaten Pinrang.

Dari keseluruhan jumlah penduduk menurut kelompok umur dapat di gambarkan melalui Tabel 3.3 berikut ini :

**Tabel 3.3**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur**

Kelompok Umur	Pria	Wanita	Jumlah	Presentase
00-04	18.111	18.077	36.188	11.73
05-09	21.171	20.429	41.000	13.48
10-14	20.836	20.2216.5831	41.057	13.30
15-19	16.254	13.085	32 437	10.64
20-24	10.785	13.367	23.870	7.73
25-29	10.224	10.905	23.591	7.64
30-34	8.761	11.260	19.666	6.37
35-39	9.791	8.124	21.051	6.82
40-44	7.018	7.0004	15.142	4.91
45-49	7.054	6.045	15.048	4.88
50-54	5.539	4.393	11.584	3.75
55-59	4.045	9.814	8.438	2.73
60 <sup>+</sup>	8.765	160.297	18.579	6.02
Jumlah	148.354	160.297	308.651	100.00

*Sumber : Olahan Data Sekunder 2005*

Dengan melihat tabel 3.3 mengenai komposisi penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang berusia dibawah 10 tahun cukup rendah, hal ini menandakan bahwa program pemerintah dalam bidang keluarga berencana (KB) mengalami sedikit keberhasilan . selain itu juga terlihat jumlah penduduk produktif (15-50) cukup besar, jumlah produktif ini merupakan yang sangat besar apabila pemerintah mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.

b. Mata Pencaharian

Secara umum potensi Sulawesi Selatan merupakan daerah agraris, dimana sebagian besar masyarakatnya hidup dari pertanian, khususnya pada daerah-daerah pedesaan. Demikia pula halnya pada masyarakat kabupaten Pinrang, sebagian besar hidupnya sebagai petani.

Hal ini juga didukung oleh keadaan alam yang besar berupa daratan yang membentang luas yang berfungsi sebagai areal persawahan dan perkebunan . Kehidupan sebagai petani ini merupakan pekerjaan turun temurun, yang tentunya telah mengalami perubahan dalam tata pengelolaan lahan yang meliputi tata cara pengelolaan yang modern.

Mata pencaharian masyarakat kabupaten Pinrang tidak sepenuhnya petani, melainkan juga memiliki pekerjaan di luar sektor pertanian. Penduduknya ada yang bekerja sebagai, nelayan, pedagang, serta pegawai bahkan ada masyarakat kabupaten Pinrang, terutama mereka yang hidup di daerah pesisir ini sebagian besar hidupnya sebagai nelayan sehingga dapat

dikatakan kabupaten Pinrang jika ditinjau dari letak geografisnya selain sebagai daerah pertanian juga sebagai daerah perikanan baik perikanan laut maupun perikanan tambak.

Dengan melihat pada keanekaragaman mata pencaharian penduduk secara langsung akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan penduduk. Pendapatan perkapita kabupaten pinrang pada tahun 2001 adalah 2.696.650 pada akhir tahun 2002 mencapai 4.339.743 atas harga yang berlaku dengan rata-rata pertumbuhan 98,84% pertahun

**Tabel 3.4**

**Komposisi Penduduk Usia 10 Tahun Ke Atas Yang Bekeja**

Lapangan Usaha	2000	2001	2002
Pertanian	77.106	75.525	80.760
Penggalian	111	381	648
Industri	4.749	2.688	3.952
Listrik, gas dan air	111	388	112
Konstruksi	3.171	2.481	3.129
Perdagangan	15.066	17.652	19.174
Komunikasi	6.255	3.149	3.341
Keuangan	753	428	923
Jasa	12.283	14.230	12.629

*Sumber: Olahan Data Sekunder 2005*

c. Komposisi Penduduk Menurut Agama

Kehidupan beragama dalam wilayah kabupaten pinrang seperti halnya kehidupan beragama secara umum dalam wilayah kesatuan Negara republic Indonesi berjalan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Pemeluknya saling menghormati dan menghargai agama yang mereka anut masing-masing.

Adapun pemeluk agama di Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini

**Tabel 3.5**  
**Komposisi Penduduk Menurut Agama**

No	Pemeluk Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	301.469	97,67%
2	Kristen Protestan	2.594	0,84%
3	Kristen Katolik	3.476	1,12%
4	Hindu/Budha	105	0,03%
5	Lainnya	107	0,03%
Jumlah		308.651	100

*Sumber : Olahan Data 2002*

d. Tingkat Pendidikan Penduduk

Dalam alinea keempat UUD 1945, tercantum salah satu tujuan pembangunan nasional Negara Republik Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai realisasi dari hasil tersebut pemerintah mewujudkan dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan bangsa baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal. Di samping hal itu juga dilakukan dengan jalan pembinaan sarana prasarana untuk membantu kecerdasan bangsa sehingga demikian akan tercipta individu-individu yang penting mengisi pembangunan bangsa.

Meskipun berbagai upaya yang telah di tempuh oleh pemerintah namaun pada kenyataanya tingkat pendidikan masyarakat masih tetap bervariasi. Hal ini memang memerlukan penanganan khusus mengingat



penduduk serta luasnya wilayah Negara kesatuan republic Indonesia. Tingkat pendidikan yang bervariasi ini juga termasuk dala masyarakat kabupaten Pinrang . Di bidang pendidikan ini persentase penduduk yang tamat SD adalah 28,57%, SLTP 12,92%, SLTA 10,98%, dan perguruan tinggi 1,57%. Secara umum tingkat pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Pinrang lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka rata-rata Sulawesi Selatan. Adapun tingkat komposisi pendidikan dapat dilihat pada tabel 3.6 sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**  
**Per Kecamatan Kabupaten Pinrang**

Kecamatan	Tidak/Belum pernah sekolah	Tidak Tamat SD	SD	SLTP	SLTA	DIII	SI
Suppa	4524	6845	5962	1900	1147	107	136
Mattiro Somp	4897	11046	13283	3144	3272	260	534
Mattiro Bulu	2053	5337	6707	2881	1618	81	415
Watang Sawitto	6258	7006	17182	10586	11978	461	801
Patampanua	3140	7339	6588	3475	3398	112	282
Cempa	1926	3532	2979	1961	1556	38	70
Duampanua	4699	1032	8723	4224	3041	301	425
Lambang	2638	1170	4927	1831	1116	166	875
Lanrisang	3062	2150	3695	1265	958	101	95
Tiroang	4530	3256	5213	2512	1021	98	102
Paletang	2154	2021	3541	2115	1350	120	112
Batulappa	2125	1254	2541	1542	865	65	98

Sumber : BPS Kabupaten Pinrang



e. Kondisi Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Pinrang selama periode 2000-2001 mengalami penurunan yaitu dari rata-rata 3,13% menjadi 3,95 berdasarkan harga yang berlaku.

Selama periode tersebut penurunan pertumbuhan sektor pertanian dari 1,62% menjadi -6,54, di sektor jasa juga mengalami penurunan dari 3,59 menjadi -1,68% demikian juga pada sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, bangunan, perdagangan, hotel dan bangunan serta angkutan dan komunikasi masing-masing 8,88%, 4,27%, 6,09%, 7,55% dan 10,12% menjadi 5,26%, -1,36%, -8,79%, 4,37%, -1,08%. Sedangkan sektor yang mengalami kenaikan adalah sektor listrik, gas dan air bersih serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan masing-masing sebesar 2,7% dan 1,67%.

Struktur ekonomi kabupaten Pinrang masih tetap didominasi oleh sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran serta jasa masing-masing sebesar 34,66%, 12,54%, 16,82% dan 11,7% serta dari sektor lainnya kontribusi kurang dari 8%. Seangkan yang terendah adalah listrik, gas dan bangunan yang hanya 1,39%. Perkembangan PDRB pada periode yang sama mengalami kenaikan yang cukup tajam yaitu dari 327,97 Miliar menjadi 1.070,72 Miliar atau naik lebih dari 30% dalam lima tahun. dari pendapatan perkapita juga mengalami kenaikan yaitu Rp. 1.696.650 menjadi 3.339.743 berdasarkan harga yang berlaku. Dari uraian diatas

ternyata peranan pemerintah dalam pembiayaan kegiatan pembangunan masih cukup tinggi dan diharapkan peranan swasta PMDM dan PMA untuk investasi dengan memanfaatkan potensi yang ada karena masih terbuka kesempatan yang luas dengan prospeknya yang cukup menjanjikan.

## **Sarana Dan Prasarana**

### **Infrastruktur Kabupaten Pinrang**

#### **1. Transportasi Darat**

Prasarana jalan sangat berperan dalam mendukung aktifitas sosial ekonomi di daerah ini dengan panjang jalan keseluruhan sampai saat ini adalah 788,19 km dimana 66,64% diantaranya dalam kondisi bagus dengan tipe permukaan berupa aspal.

#### **2. Listrik**

Kebutuhan energi listrik dipasok dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Bakaru yang terletak di sebelah timur daerah ini dan Pembangkit Sawitto dimana kedua pembangkit ini dikelola. Daya yang terpasang untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat setempat, tahun 2003 listrik yang dibangkitkan sebesar 55.981.877 kWh dan yang disalurkan sebesar 55.882.799 kWh kepada 60.920 pelanggan.

#### **3. Telekomunikasi**

Telepon dan faksimile dapat ditemukan pada hampir semua ibukota kecamatan daerah ini, yang menciptakan efisiensi komunikasi dalam skala

lokal, regional, nasional dan internasional dengan jumlah sambungan telepon yang terpasang sampai tahun 2003 sebesar 4.042 SST dan 24 wartel. Untuk pelayanan jasa Pos dilayani oleh 4 unit kantor pos yang berlokasi di Ibukota Kabupaten dan dibeberapa kecamatan.

#### **4. Air Bersih**

Kebutuhan air bersih dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dimana besarnya potensi air bersih yang tersedia memungkinkan PDAM memenuhi kebutuhan masyarakat maupun industri utamanya yang berlokasi di sekitar Ibukota Kabupaten. Sedangkan daerah yang belum dijangkau oleh pipa saluran PDAM akan dilayani oleh mobil-mobil tangki PDAM dengan potensi air baku milik PDAM sebesar 1000 liter/detik dan baru digunakan sebesar 70 liter/detik. Pada tahun 2003 tercatat 6.464 pelanggan PDAM Kab. Pinrang dan air yang tersalurkan sebesar 943.511 m<sup>3</sup>.

#### **5. Hotel dan Restoran**

Umumnya fasilitas hotel/penginapan dapat ditemukan di Ibukota Kabupaten Pinrang dengan jumlah Hotel dan penginapan sampai saat ini sebanyak sembilan buah dengan klasifikasi non-bintang namun dilengkapi dengan fasilitas yang cukup seperti pendingin ruangan atau AC. Sedangkan restoran tersedia pada hampir seluruh wilayah daerah dengan skala lokal.

## 6. Fasilitas Kesehatan

Jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Pinrang pada tahun 2003 sebanyak satu unit Rumah Sakit, 11 Puskesmas dan 53 Puskesmas Pembantu yang tersebar pada setiap Kecamatan dan Desa. Selain itu, daerah yang belum mempunyai fasilitas kesehatan, Pemda menyediakan Puskesmas Keliling.

Kabupaten Pinrang dikenal sebagai salah satu "Lumbung Pangan" di Sulawesi Selatan sekaligus penghasil udang, ikan bandeng, kakao, kopi, kemiri dan kelapa. Sebagai daerah pertanian yang memiliki sumber daya alam yang cukup, Pinrang juga memiliki kekayaan laut yang membentang sekitar 93 Km dari kota Parepare sampai ke Polmas. Luas wilayah Kabupaten Pinrang 1.961,77 Km<sup>2</sup> dengan jarak tempuh dari Kota Makassar sepanjang 173 Km.

### 3.4. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang

Sebelum dikemukakan struktur organisasi pemerintah kabupaten pinrang, khususnya struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang, maka terlebih dulu harus dipahami pengertian struktur organisasi secara teoritis agar memudahkan dalam menelaah pembahasan selanjutnya. Struktur organisasi menurut The Liang Gie adalah sebagai berikut :

" Struktur organisasi ialah yang menunjukkan segenap tugas pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi, hubungan antara fungsi-fungsi tersebut serta dan tanggung jawab anggota yang memikul tiap tugas pekerjaan itu ".<sup>44)</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka jelaslah kiranya betapa peranan organisasi secara keseluruhan didalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Ditinjau dari susut organisasi, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang merupakan salah satu wujud organisasi dalam lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas dan fungsi dalam proses pencapaian tujuan nasional.

Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 13 Tahun 2004 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang.
2. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, pendistribusian perlengkapan kantor, kepegawaian, keuangan, urusan umum dan perlengkapan . Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi yaitu pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan pemeliharaan kantor. bagian tata usaha terdiri dari :

a. Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, karsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan dan pelaksanaan rencana kebutuhan perlengkapan/perbekalan Dinas serta melaksanakan penyiapan bahan rencana kebutuhan, pengembangan pegawai, mutasi, dan tata usaha kepegawaian. Sedangkan fungsi Bagian Umum dan Kepegawaian

pengelolaan kegiatan surat menyurat yang meliputi pengetikan, penggandaan, pengiriman dan kearsipan.

b. Bagian keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas, pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi, dan perbendaharaan. Dan mempunyai fungsi penyusunan rancangan anggaran.

3. Bidang pendaftaran dan pendataan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan terhadap subjek dan obyek Pajak Daerah, Retribusi daerah, dan Pajak Bumi Bangunan (PBB). Sedangkan fungsi dari Bidang pendaftaran dan pendataan yaitu pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah melalui formulir pendaftaran serta menghimpun dan mengolah data Objek dan Subyek Wajib Pajak dan Retribusi Daerah. Bagian pendaftaran dan pendataan terdiri dari :

- a. Seksi pendaftaran dan pendataan mempunyai tugas melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah. Sedangkan fungsi dari seksi pendaftaran dan pendataan pendistribusian dan penerimaan kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak dan Retribusi Daerah.

- b. Seksi dokumentasi dan pengolahan data mempunyai tugas menghimpun, mendokumentasikan, dan mengelola data Wajib Pajak, Retribusi Daerah dan Dokumen Perpajakan lainnya. Sedangkan fungsi dari seksi dokumentasi yaitu pembuatan dan pemeliharaan Daftar Induk Waji Pajak dan Retribusi Daerah.
4. Bidang penetapan mempunyai tugas melaksanakan perhitungan dan penetapan jumlah pajak dan retribusi daerah yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, menatausahakan jumlah ketetapan PBB berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) / PBB. sedangkan fungsi dari Bidang Penetapan yaitu pelaksanaan penghitungan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah. Bidang penetapan terdiri dari :
  - a. Seksi perhitungan dan angsuran mempunyai tugas melaksanakan perhitungan, penetapan, tambahan atau pengurangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta menyiapkan surat-surat mengenai angsuran. Seksi Perhitungan mempunyai fungs yaitu pelaksanaan penghitungan penetapan secara jabatan.
  - b. Seksi penertiban surat ketetapan mempunyai tugas menerbitkan surat-surat ketetapan mengenai pajak, retribusi dan perjanjian angsuran serta



surat-surat ketetapan pajak lainnya. Sedangkan fungsi dari seksi Penerbitan yaitu Penerbitan Surat Ketetapan Pajak(SKP).

5. Bidang pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan serta Tunggakan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PBB dan pengelolaan kertas berharga. Sedangkan fungsi dari Bidang Pembukuan yaitu pelaksanaan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pungutan/pembayaran Pajak dan retribusi Daerah ke dalam Kartu Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bidang pembukuan dan pelaporan terdiri dari :

- a. Seksi pembukuan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi keuangan yang meliputi SKP, SKR, SPPT PBB, Kertas Berharga, dan ketetapan pajak lainnya. Seksi Pembukuan mempunyai fungsi yaitu penerimaan dan pencatatan SKP dan SKR dan surat-surat ketetapan pajak lainnya dan SPPT PBB.
- b. Seksi pelaporan mempunyai tugas membuat dan menyiapkan laporan mengenai realisasi Penerimaan Pajak, Retribusi Daerah, PBB, dan Kertas Berharga. Seksi Pelaporan mempunyai yaitu penyiapan laporan periodik mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah dan PBB.

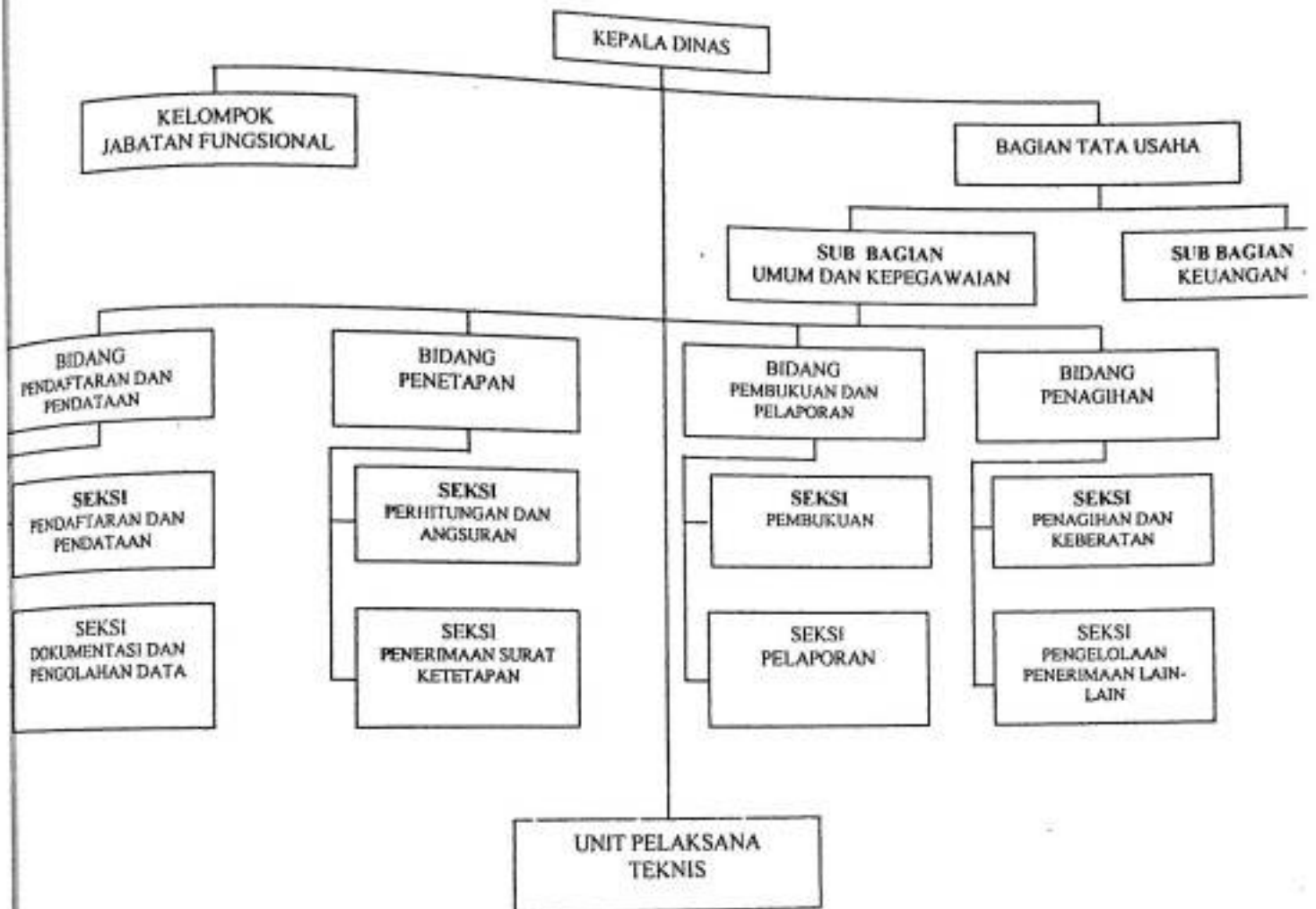
6. Bidang penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan daerah lainnya. Sedangkan fungsi dari Bidang Penagihan yaitu pelaksanaan kegiatan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bidang penagihan terdiri dari :

- a. Seksi penagihan dan keberatan mempunyai tugas menerima, memproses, menyiapkan dan mendistribusikan surat-menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan serta melayani dan meneruskan penyelesaian Keberatan dan Permohonan Banding mengenai Pajak dan Retribusi Daerah. Seksi penagihan mempunyai fungsi sebagai penyiapan dan pendistribusian surat menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan.
- b. Seksi pengelolaan penerimaan lain-lain mempunyai tugas melakukan pengelolaan penerimaan daerah dari sumber-sumber lain. Sedangkan fungsi dari Seksi Pengelolaan pengumpulan data sumber-sumber penerimaan lainnya di luar Pajak atau Retribusi Daerah

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang apabila dipandang perlu, guna memperlancarkan pelaksanaan tugas yang bersifat teknis dilapangan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai keutuhan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang yang telah diuraikan di atas, dapat dilihat pada table berikut.

BAGAN DAN STRUKTUR ORGANISASI  
DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN PINRANG



# BAB IV

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab III terdahulu, telah dibahas secara berturut-turut mengenai gambaran umum daerah penelitian yang mencakup ; kondisi wilayah dan wilayah administratif, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi, dan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang.

Pada Bab IV ini, akan diuraikan kemampuan Aparatur Dinas Pendapatan Daerah dalam Penetapan Target guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pinrang serta faktor-faktor yang mempengaruhi Kemampuan Aparatur Dinas Pendapatan Daerah Dalam Penetapan target Pendapatan Asli Daerah.

#### **4.1. Kemampuan Aparat Pemerintah Daerah**

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa pemberian otonomi pada daerah mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi dan menempatkan otonomi daerah secara utuh pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

Kemampuan suatu daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi sumber pendapatan asli daerah sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain kemampuan aparat pengelola dengan indikator latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh aparat, jumlah atau kuantitas aparat, usia dan masa waktu kerja, dan kesesuaian penempatan aparat dengan disiplin ilmu yang dimiliki. Faktor tersebut dapat diuraikan berikut ini :

#### 4.1.1. Latar Belakang Pendidikan yang dimiliki oleh Aparat.

Pendidikan bagi aparat adalah usaha meningkatkan kepribadian, pengetahuan dan kemampuan sesuai dengan tuntutan persyaratan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Tercapainya pelaksanaan penetapan target Pendapatan Asli Daerah sangat diharapkan dengan ditunjang oleh tingkat pendidikan yang memadai.

Tingkat pendidikan yang dimiliki aparat pemerintah daerah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, khususnya penetapan target pendapatan asli daerah. Tingkat pendidikan Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten pinrang khususnya Dinas Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel 4.1.

**Tabel 4.1**  
**Tingkat Pendidikan yang dimiliki Aparat**  
**Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang**

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	SLTP	2	5.9
2.	SLTA	13	38.2
3.	Diploma	3	8.9
4.	S-1	15	44.1
5.	S-2	1	2.9
	Jumlah	34	100

*Sumber : Hasil olahan data primer, 2006*

Pada Tabel 4.1. memperlihatkan bahwa aparat yang menyelesaikan studi di SLTP sebanyak 2 orang atau 5.9 %, sedangkan yang berpendidikan SLTA sebanyak 13 orang atau 38.2 %, Diploma sebanyak 3 orang atau 8.9 %, S-1 sebanyak 15 orang atau 44.1 %, dan S-2 sebanyak 1 orang atau 2.9 %.



Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparat pemerintah daerah serta didukung oleh pengetahuan dan keterampilan, sedikit banyak mempengaruhi kemampuan mereka dalam melaksanakan penetapan target pendapatan asli daerah. Yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan pengelolaan PAD untuk mencapai target yang telah ditetapkan untuk satu periode kedepan dalam menunjang otonomi daerah.

Adanya perbedaan tingkat pendidikan aparat pemerintah daerah bukan berarti harus melahirkan kesenjangan antara aparat, akan tetapi setiap aparat harus saling mendukung satu sama lain dalam berbuat dan bertindak sesuai kemampuan. Agar tercipta keterpaduan dan kerjasama yang baik dalam pelaksanaan penetapan target pendapatan asli daerah. Untuk mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh aparat dalam pengelolaan pajak daerah, dapat dilihat pada tabel 4.2. :

**Tabel 4.2.**  
**Hubungan Tingkat Pendidikan Formal**  
**Dinas Pendapatan Daerah dengan**  
**Pengetahuan dan Keterampilan yang dimiliki oleh aparat**

No.	Tingkat Pendidikan	Pengetahuan dan Keterampilan				Jumlah
		4	3	2	1	
1	SLTP	-	2	-	-	2
2	SLTA	-	7	6	-	13
3.	Diploma	-	3	-	-	3
4.	S-1	-	14	1	-	15
5.	S-2	-	-	1	-	1
	<b>Frekuensi</b>	-	<b>26</b>	<b>8</b>	-	<b>34</b>
	<b>Persentase</b>	-	<b>76,4</b>	<b>23,6</b>	-	<b>100</b>

*Sumber : Diolah dari data primer, 2006*

- Ket : 4. Kemampuan saya terlalu tinggi untuk pekerjaan ini  
3. Pekerjaan terasa cukup mudah  
2. Pekerjaan terasa sulit  
1. Pekerjaan terasa amat sulit

Pada tabel 4.2., memberikan gambaran bahwa kategori yang menyelesaikan pekerjaan dengan kemampuan terlalu tinggi tidak ada, kategori yang menyelesaikan pekerjaan dengan terasa cukup mudah adalah S-1, Diploma, SLTA, dan SLTP dengan jumlah 26 orang atau 76,4 %. Tingkat pendidikan SLTA, S1, S2 dengan kategori pekerjaan terasa cukup sulit berjumlah 8 orang atau persentase 23,6 %, sedangkan kategori pekerjaan terasa amat sulit masih tidak ada.

Dilihat dari jumlah keseluruhan responden pada tabel 4.2. menunjukkan bahwa yang menyelesaikan studi mulai dari SLTA sampai dengan S-1 memiliki kemampuan menyelesaikan pekerjaan terasa cukup mudah 48 %, menyusul kategori kemampuan terlalu tinggi dengan tingkat pendidikan S-1 dan S-2 adalah 20 %, dan terakhir adalah kategori pekerjaan terasa cukup sulit dengan tingkat pendidikan SLTP dan SLTA dengan persentase 12 %.

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa dari tabulasi yang dilakukan menunjukkan bahwa dengan pendidikan yang tinggi memiliki kemampuan yang baik dalam melaksanakan urusan pemerintahan

#### 4.1.2. Jumlah atau Kuantitas Aparat

Mengenai jumlah atau kuantitas aparat yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang, perlu adanya penambahan personil. Wilayah operasi yang cukup luas tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada, apalagi kondisi geografis wilayah Kabupaten Daerah Pinrang yang dikemukakan sebelumnya memiliki beberapa 12 kecamatan, yang terdiri dari 103 desa/kelurahan, dimana didalamnya terdapat sumber-sumber obyek pungutan.

Banyaknya jenis penerimaan daerah, menuntut adanya biaya pungut yang tinggi. Hal ini akan terkait pula dengan persoalan jumlah aparat pelaksana, oleh karena jika terjadi penambahan aparat, otomatis biaya yang dibutuhkan juga meningkat. Untuk itu bila jumlah aparat ditambah maka perlu diperhitungkan kondisi keuangan daerah, jangan sampai dana yang dialokasikan untuk pembiayaan aparat lebih besar dibanding hasil kerja yang dicapai.

Dari data yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa keadaan personil yang ada belumlah memadai jika dibandingkan luasnya wilayah kerja dan banyaknya jumlah kegiatan yang harus dikerjakan oleh aparat pengelola. Untuk itulah, perlu diperhitungkan untuk mengadakan penambahan jumlah aparat pada unit-unit pengelola Pendapatan Asli Daerah. Tentu dengan tetap menjaga keseimbangan penempatan aparat serta disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

#### 4.1.3.Usia dan Masa Kerja

Selanjutnya mengenai usia aparat pengelola pajak daerah di Daerah Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada tabel 4.3.

**Tabel 4.3.**  
**Usia Aparat Dinas Pendapatan Daerah**  
**Kabupaten Pinrang**

No.	Umur/Usia	Frekuensi	Persentase
1.	< 30 Tahun	1	3
2.	31 – 40	9	26.5
3.	41 – 50	16	47
4.	≥ 51 Tahun	8	23.5
	<b>Jumlah</b>	34	100

Sumber : Diolah dari data primer 2006

Pada tabel 4.3. menunjukkan bahwa golongan umur 30 kebawah 1 orang atau 3 %, umur 31 – 40 tahun 8 orang atau 23.5 %, umur 41 – 50 tahun 17 orang atau 50 %, dan umur 51 tahun keatas 8 orang atau 23.5 %.

Berdasarkan data tersebut dianalisa bahwa tingkat produktivitas aparat dilihat dari latar belakang golongan umur cukup tinggi, mengingat usia produktivitas manusia berada antara 26 – 45 tahun, demikian juga diperkirakan bahwa dalam kurung usia tersebut aktivitas kerja manusia cukup padat.

Selanjutnya, masa kerja adalah sebuah pengalaman bagi aparat dan merupakan hal yang penting dalam mengukur kemampuannya baik dalam kapasitasnya sebagai pemimpin maupun sebagai orang yang dipimpin. Semakin lama masa kerja aparat, maka akan semakin banyak pengalaman yang didapat selama menggeluti bidang kerjanya. Dan hal itu berdampak terhadap pengabdian, mutu, keterampilan, dan keahlian aparat itu sendiri. Karena

pengalaman memberikan pelajaran berharga bagi aparat dalam mengerjakan atau menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melihat masa kerja aparat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada tabel 4.4.

**Tabel 4.4.**  
**Masa Kerja Aparat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang**

No.	Masa Kerja	Frekuensi	Persentase
1.	< 10 Tahun	6	17.7
2.	> 10 Tahun	28	82.3
	<b>Jumlah</b>	34	100

Sumber : Diolah dari Data Primer 2006

Pada tabel 4.4. menunjukkan bahwa masa kerja aparat yang kurang dari 10 tahun sebanyak 6 orang atau 17.7 % dan yang masa kerja 10 tahun atau lebih sebanyak 28 orang dengan persentase 82 %.

Hubungan antara umur/usia dan masa kerja aparat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada tabel 4.5.

**Tabel 4.5.**  
**Hubungan Antara Umur/usia dan Masa Kerja Aparat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang**

No.	Usia	Masa Kerja		Jumlah (Persentase)
		< 10 Tahun	> 10 Tahun	
1.	< 30 Tahun	-	1	1
2.	31 – 40 Tahun	3	6	9
3.	41 – 50 Tahun	2	14	16
4.	> 51 Tahun	-	8	8
	<b>Frekuensi</b>	5	29	34
	<b>Persentase</b>	14.7	85.3	100

Sumber : Diolah dari Data Primer 2006

Dilihat dari jumlah keseluruhan responden pada tabel 4.5. menunjukkan bahwa pada usia < 31-40 tahun sebanyak 3 orang dan 41-50 tahun sebanyak 2

orang mempunyai kategori masa kerja < 10 tahun dengan jumlah keseluruhan 5 orang atau 14.7 % dan pada usia < 30 tahun sebanyak 1 orang, 31 – 40 tahun sebanyak 6 orang, 41-50 tahun sebanyak 14, dan > 51 tahun sebanyak 8 orang mempunyai kategori masa kerja > 10 tahun dengan jumlah keseluruhan 29 orang atau 85.3 %

Berdasarkan hasil tabulasi menunjukkan bahwa tingkat produktivitas kerja aparat berada pada usia 41 – 50 tahun yang mempunyai masa kerja > 10 tahun. Hal ini merupakan tolak ukur bahwa pada usia tersebut aktivitas kerja aparat cukup padat dalam menjalankan tugas-tugas sebagai unsur pemerintah daerah.

#### **4.1.4. Kesesuaian Penempatan Aparat dengan Disiplin Ilmu yang Dimiliki**

Dalam usaha menciptakan pemerintahan yang senantiasa mengedepankan sikap profesionalisme, maka setiap aparat dituntut untuk memiliki kapabilitas keilmuan, keahlian ataupun keterampilan dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di setiap bidang kerja yang digeluti. Dalam pemerintahan khususnya Dinas Pendapatan Daerah, setiap bidang kerja masing-masing aparat dituntut adanya kesesuaian pendidikan aparat pelaksana dengan bidang kerjanya agar tercapai apa yang menjadi tujuan dalam pemerintahan itu sendiri. Hal ini merupakan indikator penting dalam hubungannya dengan kemampuan aparat pemerintah. Karena dengan adanya kesesuaian tersebut, maka akan dapat menjamin efektivitas dan efisiensi serta kualitas kerja yang baik. Untuk melihat lebih lanjut hubungan kemampuan



aparatus pemerintah daerah yang sesuai dengan kedudukannya (golongan), dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini.

**Tabel 4.6**  
**Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Golongan**  
**Aparatus Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang**

No.	Tingkat Pendidikan	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1.	SLTP	-	2	-	-	2
2.	SLTA	-	5	8	-	13
3.	Diploma	-	1	2	-	3
4.	S-1	-	2	10	3	15
5.	S-2	-	-	1	-	1
	<b>Frekuensi</b>	-	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>34</b>
	<b>Persentase</b>	-	<b>29.4</b>	<b>61.8</b>	<b>8.8</b>	<b>100</b>

Sumber : Diolah dari Data Primer 2006

Pada tabel 4.6. menunjukkan bahwa aparatus yang menyelesaikan studi pada SLTP 2 orang, SLTA 5 orang, Diploma 1 orang, S1 2 orang mempunyai kategori masuk dalam Golongan II dengan jumlah keseluruhan adalah 10 orang atau 29.4 %, aparatus yang menyelesaikan studi dari SLTA masing-masing 8 orang dan Diploma 2 orang, S1 10 orang dan 1 orang S2 masuk dalam Golongan III berjumlah 21 orang atau 61.8 %, sedangkan aparatus yang menyelesaikan studi dari S1 3 orang masuk golongan IV dengan jumlah keseluruhan 3 orang atau 8.8 %,

Dari tabel 4.6 baik dilihat dari tabel frekuensi maupun yang dilakukan dengan tabulasi silang menunjukkan bahwa penempatan/kedudukan aparatus dengan tingkat pendidikannya masing-masing sudah sangat tepat dengan



disiplin ilmunya, hal ini akan menjamin efektifitas dan efesiensi serta kualitas kerja yang baik.

#### **4.2. Faktor Yang Mempengaruhi Kemampuan Aparat dalam Penetapan Target Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pinrang**

##### **4.2.1. Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia**

Sarana dan prasarana merupakan hal yang cukup berpengaruh dalam pelaksanaan penetapan target pendapatan asli daerah. Kita tidak dapat memungkiri bahwasanya kemampuan yang dimiliki oleh aparat tidak dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin apabila sarana dan prasarana tersebut sangat kurang dalam hal ini akan berakibat terhadap kinerja aparat dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Sarana yang dimiliki Dipenda kab Pinrang masih kurang, mengingat volume pekerjaan yang melakukan pungutan terhadap wajib retribusi dan wajib pajak . sedangkan prasarana yang dimiliki memerlukan perbaikan dan memfungsikan pasar-pasar di setiap kecamatan serta perbaikan jalan-jalan untuk mmemperlancar hubungan lalu lintas perdagangan agar target untuk meningkat PAD dapat tercapai. Untuk melihat pengaruh sarana prasarana yang dimiliki Dinas Pendapatan Daerah kabupaten pinrang, dapat dilihat pada tabel 4.7 dan tabel 4.8 berikut :

**Tabel 4.7**  
**Sarana yang dimiliki**  
**Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang**

Jenis sarana	Yang tersedia	Dibutuhkan/penambahan
Mesin ketik	8	14
Mesin stensil	1	1
Mesin hitung	1	1
Lemari arsip	7	10
Computer	2	6
Brang Kas	1	2
Sepeda Motor	2	8
Mobil Dinas	2	2

*Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kab. Pinrang*

**Tabel 4.8**  
**Keadaan prasarana yang ada**  
**Di Daerah Kab. Pinrang**

Nama prasarana	Tersedia	Tidak berfungsi
Kios Inpres	255	-
Kios Swadaya	149	-
LOSD Inpres	1.050	35
LOSD Swadaya	25	-
Rumah Makan/Restoran	70	-
Hotel/Wisma/Penginapan	12	-
Bioskop/Karaoke	3	-
Pasar Inpres	18	3
Pasar Desa	57	38

*Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kab. Pinrang*

#### 4.2.2. Sistem/Cara Penetapan Target Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan informasi yang diperoleh di lokasi penelitian tentang sistem atau cara penetapan target pendapatan asli daerah. Penetapan target pendapatan asli daerah merupakan langkah awal dari pengelolaan

Pendapatan Asli Daerah. Penetapan target masuk pada bagian perencanaan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain PAD yang sah. Sistem penetapan yang dimaksud dalam kegiatan perencanaan adalah kegiatan dalam menentukan target yang ingin dicapai dari Pendapatan Asli Daerah dalam satu tahun anggaran.

Sebagai langkah awal pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, maka kegiatan penetapan target sangat menentukan dalam upaya pengelolaan pendapatan asli daerah. Hal ini mudah dipahami, karena kegiatan tersebut akan menjadi dasar dalam melakukan kegiatan selanjutnya. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah sangat tergantung pada kegiatan penetapan target pendapatan asli daerah.

Kegiatan perencanaan yang dimaksud adalah kegiatan menentukan besarnya target yang ingin dicapai dari pendapatan asli daerah untuk satu tahun anggaran. Seperti yang telah diuraikan terdahulu bahwa untuk mengukur kegiatan perencanaan maka variabel yang digunakan adalah kegiatan pendaftaran, pendataan dan kegiatan penetapan.

Dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran menempuh dua cara yaitu sebagai langkah awal dari pelaksanaan kegiatan pendaftaran wajib pajak, petugas dalam bidang ini memanfaatkan data perpajakan yang

sudah ada sebelumnya. Dengan demikian maka bagi wajib pajak yang sudah lengkap data subyek/penanggung pajaknya, sudah dapat dipersiapkan penyampaian formulir pendaftaran secara lengkap nama dan alamatnya.

Kegiatan selanjutnya dari sistem penetapan target pendapatan asli daerah ialah melaksanakan kegiatan pendataan yang merupakan kelanjutan dari kegiatan pendaftaran. Kegiatan pendataan dimaksudkan untuk memperoleh data perpajakan dari masing-masing wajib pajak. Data perpajakan tersebut berguna sebagai dasar dalam penetapan besarnya jumlah pajak yang akan dikenakan kepada wajib pajak yang bersangkutan.

Pelaksanaan kegiatan pendataan hanya merupakan kelanjutan dari kegiatan pendaftaran, sehingga dengan demikian apa yang menjadi output dari kegiatan pendaftaran senantiasa menjadi bahan atau input bagi pelaksanaan pendataan. Untuk menjaga kelancaran kegiatan pendataan, maka setiap wajib pajak diberikan batas waktu pengembalian Surat Pemberitahuan (SPT) ke Dispenda, dan apabila dalam batas waktu tersebut wajib pajak belum juga mengembalikan SPT, maka Dispenda menempuh jalan dengan memberi surat peringatan dan selanjutnya diberikan surat teguran, bila dengan surat peringatan tersebut wajib pajak belum juga mengembalikan surat pemberitahuan (SPT), maka pihak Dispenda memberikan konsekuensi kepada wajib pajak yang bersangkutan yaitu penetapan secara jabatan.

Peran aparaturn Dinas Pendapatan Daerah sebagai aparat pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu membimbing, membina dan mengkoordinasikan dengan aparat pengelola Pendapatan Asli Daerah lainnya terhadap pelaksanaan dan pendataan Wajib Pajak, Wajib Retribusi Daerah, penetapan besarnya Pajak/Retribusi Daerah serta pekerjaan pencatatan dan pelaporan atas Pajak/Retribusi Daerah dan pendapatan Daerah lainnya.

Aparatur Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) dengan beberapa Unit kerja pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperhatikan objek dan subyek potensi pendapatan asli daerah atau mengacu pada realisasi target pendapatan asli daerah tahun anggaran yang lalu. Setelah memperhatikan potensi sumber pendapatan asli dianalisa berdasarkan data dan fakta yang ada, Tim Penyusunan Anggaran menyampaikan kepada semua pimpinan Unit Kerja untuk memasukkan rencana penerimaan sesuai potensi objek dan subjek pajak/retribusi daerah dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang dianggap sah. Hasil rencana target kemudian dibahas bersama-sama sebelum diajukan ke DPRD, untuk di bahas menjadi peraturan daerah yang kemudian menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Untuk melihat kedudukan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pinrang maka dapatlah digambarkan target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam tiga tahun terakhir ini yang secara

keseluruhan dipungut oleh Dispenda Kabupaten Pinrang dengan gambaran tersebut dapatlah diambil kesimpulan bagaimana kedudukan dan peranan Pendapatan Asli Daerah dalam keuangan Kabupaten Pinrang. Sedangkan data mengenai realisasi penerimaan Pajak Daerah tiga tahun terakhir yang dikelola oleh Dispenda Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada bagian lampiran

Untuk itu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang sebagai salah satu dinas otonom yang disertai tugas mengelola keuangan daerah dituntut untuk bekerja dengan sungguh-sungguh agar pemasukan dari sumber pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah dapat meningkat dari tahun ke tahun.

#### **4.2.3. Volume Pekerjaan**

Volume pekerjaan merupakan beban kerja yang dilakukan aparat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang setiap hari dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan yang maksimal dan didukung oleh jumlah aparat dan fasilitas yang ada agar volume pekerjaan terlaksana dengan baik. Untuk melihat pengaruh volume pekerjaan dengan fasilitas yang ada baik untuk dinas luar maupun pekerjaan rutin dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini :

**Tabel 4.9**  
**Fasilitas untuk Dinas Luar**  
**Dispenda Kabupaten Pinrang**

Fasilitas untuk Dinas Luar dengan Volume pekerjaan	Frekuensi	Persentase
A	-	-
B	2	5.9
C	28	82.3
D	4	11.8
Total	34	100

*Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2006*

Keterangan :

- A. Jumlah fasilitas terlalu banyak, volume pekerjaan terlalu sedikit
- B. Jumlah fasilitas cukup banyak, volume pekerjaan kurang
- C. Jumlah fasilitas kurang, volume pekerjaan cukup banyak
- D. Jumlah fasilitas dan volume pekerjaan sesuai banyaknya

**Tabel 5.0**  
**Fasilitas untuk pekerjaan Rutin**  
**Pada Dispenda Kabupaten Pinrang**

Fasilitas untuk Dinas Luar dengan Volume pekerjaan	Frekuensi	Persentase
A	-	-
B	2	5.9
C	28	82.3
D	4	11.8
Total	34	100

*Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2006*

Keterangan :

- A. Jumlah fasilitas terlalu banyak, volume pekerjaan terlalu sedikit
- B. Jumlah fasilitas cukup banyak, volume pekerjaan kurang
- C. Jumlah fasilitas kurang, volume pekerjaan cukup banyak
- D. Jumlah fasilitas dan volume pekerjaan sesuai banyaknya



Hubungan fasilitas untuk Dinas Luar dan fasilitas yang ada untuk pekerjaan Rutin dengan volume pekerjaan pada Dipenda Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5.1**  
**Hubungan fasilitas untuk Dinas Luar**  
**dan Fasilitas yang ada untuk pekerjaan Rutin dengan Volume**  
**Pekerjaan pada Dipenda Kabupaten Pinrang**

Fasilitas Untuk Dinas Luar dengan volume pekerjaan	Fasilitas untuk Pekerjaan Rutin dengan Volume Pekerjaan				Total
	1	2	3	4	
A	0 (0%) 0%	0 (0%) 0%	0 (0%) 0%	0 (0%) 0%	0 (0%)
B	0 (0%) 0%	0 (0%) 0%	1 (3.70%) 2.94%	1 (25%) 2.94%	2 (5.88%)
C	0 (0%) 0%	3 (100%) 8.82%	24 (88.89%) 70.59%	1 (25%) 2.94%	28 (82.35)
D	0 (0%) 0%	0 (0%) 0%	2 (7.41%) 5.88%	2 (50%) 5.88%	4 (11.76%)
<b>Total</b>	0 (0%) 0%	3 (100%) 8.82%	27 (100%) 79.41%	4 (100%) 11.76%	34 (100%) 100%

*Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2006*

Pada tabel 5.1 menunjukkan bahwa jumlah fasilitas kurang, volume pekerjaan banyak yaitu 100% dan hanya 25% yang menyatakan jumlah fasilitas cukup banyak dan volume pekerjaan kurang, menyusul 7.41% yang menyatakan jumlah fasilitas dan volume pekerjaan sesuai banyaknya.

Tabulasi silang yang dilakukan dari keseluruhan jumlah responden menunjukkan bahwa fasilitas kurang, volume pekerjaan banyak yaitu 70.59% dan hanya 5.88% yang menyatakan jumlah fasilitas dan volume pekerjaan sesuai banyaknya.

Dari tabel tersebut dapat dianalisa bahwa kurangnya fasilitas unit untuk pekerjaan di kantor sangat mempengaruhi volume pekerjaan aparat dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

#### 4.2.4. Kesejahteraan Aparat

Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan aparat sebagai pelaksana dalam pemungutan terhadap wajib retribusi dan wajib pajak, hal ini dapat dilihat dari upah pungut yang diterima sebagai tambahan penghasilan bagi aparat dan penghasilan kerja (gaji) pada tabel 5.2 dan 5.3 :

**Tabel 5.2**  
**Kepuasan Upah Pungut yang diperoleh Aparat**  
**Dipenda Kabupaten Pinrang**

Kepuasan Upah Pungut	Frekuensi	Persentase
Sangat memuaskan	4	11.8
Cukup memuaskan	19	55.9
Kurang memuaskan	11	32.3
Tidakl memuaskan	-	-
Total	34	100

*Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2006*

**Tabel 5.2**  
**Penghasilan kerja yang diperoleh Aparat**  
**Dipenda Kabupaten Pinrang**

Penghasilan Kerja	Frekuensi	Persentase
Sangat memuaskan	2	5.9
Cukup memuaskan	18	53
Kurang memuaskan	14	41.1
Tidakl memuaskan	-	-
Total	34	100

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2006

Hubungan kepuasan upah pungut yang diperoleh dengan kesejahteraan yang diberikan kepada keluarga, dari penghasilan kerja yang ada pada aparat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang dapat dilihat pada tabel 5.4 berikut :

**Tabel 5.4**  
**Hubungan Upah Pungut dengan Kesejahteraan yang**  
**diberikan pada Keluarga pada Aparat Dipenda Kabupaten Pinrang**

Upah Pungut	Penghasilan kerja yang diberikan pada keluarga				Jumlah
	4	3	2	1	
Sangat memuaskan	2 (50%) 5.88%	0 (0%) 0%	0 (0%) 0%	0 (0%) 0%	2 (5.88%)
Cukup memuaskan	0 (0%) 0%	16 (84.21%) 47.06%	2 (18.18%) 5.88%	0 (0%) 0%	18 (52.94%)
Kurang memuaskan	2 (50%) 5.88%	3 (15.79%) 8.82%	9 (81.82%) 26.47%	0 (0%) 0%	14 (41.18%)
Tidak memuaskan	0 (0%) 0%	0 (0%) 0%	0 (0%) 0%	0 (0%) 0%	0 (0%)
<b>Frekuensi</b>	4 (100%) 11.76%	19 (100%) 55.88%	11 (100%) 32.35%	0 (0%) 0%	34 (100%) 100%

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2006

Pada tabel 5.4 menunjukkan bahwa upah pungut yang sangat memuaskan berada pada kategori 50%, menyusul cukup memuaskan berada pada kategori memadai yaitu 84.21%, dan kurang memuaskan berada pada kategori kurang memadai yaitu 81.82%. Sedangkan cukup memuaskan berada pada kategori kurang memadai yaitu 18.18%, dan masing-masing pada kategori sangat memadai yaitu 50% dan kategori memadai yaitu 15.79% berada pada upah pungut kurang memuaskan.

Dilihat dari tabulasi silang yang dilakukan terhadap seluruh responden menunjukkan bahwa upah pungut yang sangat memuaskan berada pada kategori sangat memadai adalah 5.88%, menyusul cukup memuaskan berada pada kategori memadai yaitu 47.06%, dan kurang memuaskan berada pada kategori kurang memadai yaitu 26.47%.

Dari uraian tersebut maka dapat dianalisa bahwa kesejahteraan aparat Dinas Pendapatan Daerah Kab. Pinrang cukup memadai dari hasil upah pungut maupun dari penghasilan kerja yang diperoleh untuk membiayai kehidupan keluarganya.

#### **4.3. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang**

##### **4.3.1. Sumber-sumber Penerimaan Daerah**

Pelaksanaan urusan rumah tangga daerah harus mencerminkan kemampuan akan pembiayaan yang dapat di peroleh dari sumber-sumber pendapatan daerah untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah.

Kemampuan dalam membiayai urusan-urusan rumah tangganya berarti menunjukkan besarnya pendapatan yang diperoleh daerah itu sendiri.

Penerimaan pendapatan asli daerah dibutuhkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah maka untuk memperolehnya tidak akan terlepas dari ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pendapatan asli daerah. Mengenai pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah bertumpu pada tingkat kemampuan dalam penyediaan anggaran yang dibutuhkan sesuai keperluannya.

Kemampuan pemerintah dalam menyediakan anggaran tidak dengan serta merta berarti bahwa pemerintah daerah harus mempunyai kemampuan mengelola sumber-sumber keuangan daerah saja tetapi juga sekaligus harus mampu mendorong kemajuan perekonomian masyarakat. Kedua hal tersebut diatas sangatlah perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, karena system penarikan pajak daerah maupun pemungutan system retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya berdasarkan prinsip asli dan merata memiliki andil besar dalam upaya pemerintah untuk memajukan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selanjutnya akan digambarkan beberapa beberapa sumber pendapatan asli daerah sebagai berikut :

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku penerimaan pajak daerah kabupaten Pinrang, dapat dilihat pada tabel 5.5 berikut:

**Tabel 5.5**  
**Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Pinrang**  
**Tahun Anggaran 2004-2006**

PAJAK PENERIMAAN DAERAH	Tahun					
	2004-2005		2005-2006		2006-2007	
	Bulan lalu	Bulan ini	Bulan lalu	Bulan ini	Bulan lalu	Bulan ini
Pajak hotel dan restoran	32.818.869	-	12.276.150	1.896.100	28.097.375	3.617.980
Pajak Hiburan	3.306.000	-	32.432.375	9.100.000	25.741.250	1.500.000
Pajak Reklame	21.471.000	-	22.040.500	1.035.000	14.067.500	17.005.000
Pajak Penerangan Jalan	1.708.194.622	576.882.500	1.823.399.285	728.262.345	1.296.415.110	450.901.685
Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan gol C	152.953.205	8.773.340	75.888.351	150.782.812	36.906.759	27.071.137

*Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang*

Penerimaan pajak daerah pada tabel 5.5 selama tiga tahun anggaran tersebut terlihat bahwa Pajak Penerangan jalan memberikan penerimaan yang tertinggi yaitu sebesar Rp. 1.823.399.285 pada tahun anggaran 2005/2006 di susul Pajak Pengambilan dan pengelolaan bahan galian Golongan C yaitu sebesar Rp. 152.953.205 juga pada tahun anggaran 2004/2005 sedangkan sektor pajak terendah pada

sektor pajak reklame yaitu sebesar Rp. 1.035.000 pada tahun anggaran 2005/2006

b. **Penerimaan Retribusi Daerah**

Retribusi merupakan salah satu variabel pendukung dalam pelaksanaan otonomi daerah . Di Kabupaten Pinrang penerimaan retribusi pada setiap tahun anggaran mengalami variasi. Pada tahun anggarannya mengalami variasi pada tahun 2005 dengan jelas terlihat penerimaan pada rating ini sangat besar. Retribusi daerah secara langsung atau tidak langsung akan memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan kehidupan pemerintahan setiap daerah, tidak terkecuali di kabupaten Pinrang.

Secara esensial retribusi kayaknya sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh masyarakat sebagai sebuah kesatuan sistem dalam sebuah Negara, dimana wujud nyata dari hasil pemenuhan kewajiban tersebut dapat dirasakan lewat pelayanan dan jasa yang diberikan pemerintah. Pada Tabel 5.6 berikut akan penulis gambarkan data yang penulis peroleh dari kantor dinas pendapatan daerah kabupaten Pinrang tentang penerimaan retribusi terbesar yang diterima oleh daerah pada setiap tahunnya berasal dari beberapa sektor diantaranya, pelayanan kesehatan, izin angkutan hasil bumi dan pelayanan pasar.



**Tabel 5.6**  
**Realisasi Penerimaan Retribusi Kabupaten pinrang**  
**Tahun Anggaran 2004/2006**

MAAN RETRIBUSI	Tahun					
	2004-2005		2005-2006		2006-2007	
pelayanan kesehatan	1.328.008.189	-	4.133.120.7560	1.317.349.816	1.212.528.827	138.185.200
esehatan	153.359.260	5.315.950	220.053.050	68.062.697	93.345.995	19.771.500
bersihan	93.972636	10.355.000	72.238.250	9.545.250	220.157.900	35.439.500
emokaman	4.080.000	-	3.345.000	270.000	-	-
aha penye. Kakus	2.520.000	-	1.855.000	560.000	-	-
endirikan bangunan	221.487.500	8.587.500	224.695.000	49.912.500	-	-
Biaya cetak KTP dan pil	82.300.000	40.000.000	157.980.000	636.238.069	369.675.000	90.000.000
asar	404.160.350	28.708.400	375.920.310	75.729.100	269.685.700	34.286.200
ngk. Hasil bumi	754.253.919	5.287.800	585.580.578	119.593.600	355.430.230	81.837.900
kendaraan bermotor dan otor	102.848.000	5.985.500	201.509.000	12.187.000	131.881.000	12.459.000
Usaha Terminal	264.367.000	9.680.000	286.739.000	26.377.000	234.853.000	17.200.000
Usaha tempat khusus parker asar kecil	59.555.500	4.711.000	58.617.000	6.002.000	40.303.000	5.453.000
nyek	27.850.000	780.000	31.150.000	440.000	21.230.000	979.000
saha rum. pem. hewan	41.507.500	1.365.000	42.055.000	4.257.000	27.690.000	2.275.000
gangguan	27.800.200	-	20.389.500	9.075.600	2.498.300	-
l hutan	128.294.100	-	130.922.000	-	92.953.765	7.328.800
pengaturan & peng. SIUP, R	20.005.000	-	26.925.000	665.000	21.800.000	1.520.000
. Kelayakan ling.	14.000.000	-	3.500.000	6.250.000	2.000.000	1.000.000
Ketenaga kerjaan	17.114.600	1.240.400	20.000.000	20.625.500	2.000.000	13.019.500
usaha Pem. Kek. Daerah	214.052.000	119.349.000	128.830.000	78.400.000	121.602.000	76.040.000
	-	-	52.573.600	5.875.000	38.200.000	-
g.biaya cetak peta dan nya	-	-	6.553.500	5.255.000	4.596.000	1.070.000
plat.No. Rumah	-	-	2.550.000	46.848.000	-	-
rusda dan hasil	-	-	-	-	-	-
ik.daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Selain pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Pinrang, salah satu variabel lainnya adalah perusahaan daerah. Perusahaan daerah adalah salah satu badan usaha yang dibentuk di daerah untuk mengelola hasil kekayaan daerah serta perekonomian daerah, dan diharapkan sebagai sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu, perusahaan daerah haruslah bersifat profesional dan harus berpegang teguh pada prinsip ekonomi umum yakni efisien. Hasil kekayaannya dikelola daerah ini ada tiga jenis yakni Bank Pembangunan Dearah, Perusahaan Air minum, dan bagian laba PERUSDA.

Salah satu sumber PAD yang diharap dapat memberikan masukan tambahan kepada daerah adalah penerimaan dari bagian laba perusahaan daerah dan badan usaha milik daerah. Penerimaan perusahaan daerah dan badan usaha milik daerah selama tiga tahun anggaran terakhir dalam periode 2004-2006 menunjukkan peningkatan yang tidak tetap.

**Tabel 5.7**  
**Realisasi Hasil Penerimaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**  
**Tahun Anggaran 2004/2006**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Tahun		
	2004/2005	2005/2006	2006/2007
- BPD S.S. Cab. Pinrang	1.379.807.439	1.737.390.253	2.220.925.080

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Pinrang

d. Penerimaan lain-lain

Penerimaan lain-lain di kabupaten terdiri dari beberapa sektor yang diharapkan dapat menunjang peningkatan PAD kabupaten Pinrang. Tabel 5.8 akan memberikan gambaran tentang penerimaan lain-lain. Kabupaten Pinrang pada tahun anggaran 2004-2006.

**Tabel 5.8**  
**Penerimaan lain-lain Kabupaten Pinrang**  
**Tahun Anggaran 2004-2006**

Penerimaan	Tahun					
	2004/2005		2005/2006		2006/2007	
- Jasa Giro Kas daerah	331.365.610	1.171.107	847.903.396	68.688.836	2.258.175.696	512.021.228
- Kerugian Uang Daerah	32.558.240	-	166.038.456	-	48.743.462	136.063.000
- Pendapatan Lain-lain	801.558.021	69.367.120	974.99.774	87.769.936	1.172.57.992	2.636.620
- Hasil penj.daerah yg tdk dipisahkan	-	-	-	-	157.687.025	228.032.240
- Hasil Penjualan Sirtu (lain-lain PAD yang sah)	21.700.000	141.400.000	242.872.040	250.000.000	145.000.000	-
- Penerimaan bazaar murah & biit tanaman (lain-lain PAD yang sah)	-	-	-	3.000.000	45.000.000	-
- Bantuan Pemb.Plat No.Rumah	5.000.000	-	-	-	-	-
- Obyek Wisata	28.085.000	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kab. Pinrang

Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa penerimaan-penerimaan lain-lain terdiri dari beberapa sektor yang setiap tahunnya memberikan kontribusi yang berbeda-beda, sementara penerimaan lain-lain tetap

sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan PAD Kab. Pinrang.

#### **4.3.2. Target dan Realisasi/Tahun Anggaran**

Dalam usaha memacu jalannya roda pembangunan di daerah, maka dengan diberikannya hak otonomi kepada daerah akan membuka kesempatan bagi pemerintah Kabupaten Pinrang menetapkan berbagai kebijakan daerahnya. Untuk dapat membangkitkan animo kerja bagi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan maka pemerintah di daerah semaksimal mungkin menggali sumber-sumber pendapatan daerah dengan menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan, baik berupa peraturan daerah maupun pembangunan sarana-sarana yang dapat digunakan masyarakat, seperti : pasar, tempat-tempat parkir, terminal, tempat-tempat hiburan, dan lain-lain yang dibangun atas prakarsa pemerintah di daerah yang diharapkan sebagai sumber-sumber pemasukan keuangan bagi daerah.

Dari data yang diperoleh sekaitan dengan peningkatan Pendapatan asli Daerah Kabupaten Pinrang, memperlihatkan bahwa untuk tahun anggaran 2004/2005 PAD yang ditargetkan Rp. 13.128.840.375 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 9.332.401.504 atau pencapaian rata-rata adalah 71.08 %. Tahun anggaran berikutnya yaitu tahun 2005/2006 PAD ditargetkan sebesar Rp. 13.458.934.100 direalisasikan yaitu Rp. 12.686.196.182 atau mencapai rata-rata 94.26%. Selanjutnya dalam

tahun anggaran 2006/2007 realisasi penerimaan PAD yang dicapai adalah sebesar Rp12.604.531.456 dari rencana target Rp 16.273.483.931 atau 77.45%.

Untuk lengkapnya mengenai uraian data dari target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Pinrang untuk tahun anggaran 2004/2005 hingga tahun anggaran 2006/2007 dapat dilihat pada tabel berikut 5.9

**Tabel 5.9**  
**Pencapaian Rata-rata PAD Kabupaten Pinrang**  
**Tahun anggaran 2004/2005 hingga 2006/2007**

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Persentase
2004/2005	13.128.840.375	9.332.401.504	71.08%
2005/2006	13.458.934.100	12.686.196.182	94.26%
2006/2007	16.273.483.931	12.604.531.456	77.45%

*Sumber : Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pinrang*

#### **4.3.3. Dasar Hukum Pelaksanaannya**

Semua pungutan Daerah Kabupaten Pinrang telah mempunyai landasan/dasar hukum, telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang lebih tinggi. Dan telah diundangkan dalam lembaran Daerah sesuai maksud UU No. 22 Tahun 1999.

Dampak produk hukum yang telah dikeluarkan Pemda Kabupaten Pinrang terhadap peningkatan PAD maupun perekonomian daerah antara lain :

a. Dampak bagi PAD

- Menjamin kepastian hukum tentang pengelolaan PAD
- Meningkatkan PAD karena perubahan tarif atau karena pembuatan perda baru atas suatu obyek PAD yang belum dipungut karena belum adanya perda
- Lancarnya pelaksanaan koordinasi antara instansi terkait
- Memperjelas tugas dan tanggung jawab instansi pengelola PAD
- Memudahkan pengawasan, baik fungsional maupun melekat

b. Dampak bagi perekonomian Daerah

- Mengatur arus barang dan jasa
- Beregulasi dan debirokratisasi
- Mengatur tingkat inflasi
- Meningkatkan pendapatan masyarakat
- Menstabilkan harga

Data produk hukum menyangkut pungutan daerah sejak tahun anggaran 2004/2006 antara lain :

1. Perda No.12 Tahun 1992 tentang Pajak pertunjukan dan keramaian umum
2. Perda No.9 Tahun 1998 tentang Pajak pemamfaatan air bawah tanah, air permukaan
3. Perda No. 1 tahun 2000 tentang Retribusi rumah potong hewan.
4. Perda No. 2 Tahun 2000 btentang Retribusi pemakaian kekayaan Daerah.
5. Perda No.8 Tahun 2000 tentang Retribusi kebersihan dan keindahan

Secara lengkap mengenai dasar hukum pelaksanaan pungutan daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO	JENIS PUNGUTAN	PERDA
		NOMOR/TAHUN
1.	Pajak Pembangunan	11 tahun 1992
2.	Pajak kendaraan tidak bermotor	5 tahun 1990
3.	Pajak pajak hotel dan restoran	4 tahun 1998
4.	Pajak hiburan	5 tahun 1998
5.	Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah	2 tahun 2000
6.	Retribusi rumah potong hewan	1 tahun 2000
7.	Retribusi tempat parkir	5 tahun 2000

Sumber : Kantor Daerah Kabupaten Pinrang

#### 4.4.4. Kemungkinan Pengembangannya

Pada dasarnya setiap penetapan target Pendapatan Asli Daerah sebagai bagian dari tahap perencanaan pengelolaan ataupun penyelesaian suatu permasalahan dalam suatu organisasi, apakah bersifat kedalam



maupun bersifat keluar, selalu dirasakan terjadinya kesulitan-kesulitan ataupun timbulnya berbagai rintangan dan hambatan yang tidak mungkin dihindari secepat mungkin. Hal ini disebabkan karena adanya kendala yang timbul baik secara tidak disengaja maupun disengaja. Demikianpun penetapan target sebagai bagian dari pengelolaan PAD ataupun penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, utamanya di Daerah Kabupaten Pinrang. Sebagai konsekwensi kompleksnya permasalahan yang timbul dalam masyarakat.

Penggalian dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah pada daerah Kabupaten Pinrang, tetap menemui hambatan dan rintangan yang tidak dapat dihindari. Sebagai misalnya, adanya hambatan iklim dan pada prinsipnya tidak terlepas dari ATHG (Ancaman Tantangan Hambatan Gangguan). Masalah lain yang merupakan faktor penentu berhasil tidaknya peningkatan pendapatan asli daerah ialah kemampuan aparat pengelolanya.

Sebagai konsekwensi dari ketidak mampuan aparat pengelolanya sumber pendapatan asli daerah, terutama pembenahan organisasi, baik penataan struktur organisasi, tata kerja dan formasi terdapat pada setiap unit-unit pengelola. Disamping itu Karen penyusunan program tidak jelas.pembagian tugas yang berpusat pada satu tangan, penempatan petugas tidak berdasarkan presentase. Semua ini sangat mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah.

Dari hambatan dan masalah yang dihadapi, perlu kiranya dicarikan jalan keluar agar semua peningkatan pendapatan asli daerah dapat berkembang dengan baik dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Usaha peningkatan pendapatan asli daerah hendaknya dilakukan secara intensif, dengan cara pembenahan organisasi, penyusunan tata kerja dan formasi sesuai dengan kebutuhan volume luas wilayah bagi tiap-tiap unit organisasi.

Landasan pengaturan yang berkenaan dengan pendapatan asli daerah, juga masih menimbulkan permasalahan. Perkembangan keadaan mengharuskan peraturan yang telah dikeluarkan beberapa puluh tahun yang lalu perlu disesuaikan dan disempurnakan lebih lanjut.

Setelah memahami kondisi wilayah kemampuan aparat pengelola potensi keuangan daerah dan memperhatikan permasalahan yang dihadapi dalam pemungutan dan pengelolaan sumber pendapatan yang ada. Perlu dirumuskan beberapa kebijaksanaan dan usaha untuk meningkatkan pendapatan daerah, khususnya peningkatan pendapatan asli dimasa yang akan datang.

Dalam hal ini kebijaksanaan dan usaha yang ditempuh adalah dalam bentuk intensifikasi dan eksentifikasi pemungutan, sehingga diharapkan pendapatan asli daerah dapat meningkatkan kemampuan daerah. Kebijaksanaan dan usaha intensifikasi pemungutan berupa peningkatan pendapatan asli daerah dan sumber yang telah ada atau yang

berjalan selama ini. Mungkin masih ada potensi kearah peningkatannya, seperti dalam hal pajak pembangunan, pajak perusahaan, pajak reklame retribusi izin bangunan, retribusi tempat rekreasi, penerimaan pasar, masih mungkin untuk ditingkatkan tarifnya.

Kebijaksanaan dan usaha ekstensifikasi dalam pemungutan pendapatan adalah berupa mencari dan mencari sumber pendapatan asli daerah yang baru dalam batas ketentuan perundang-undangan. Selama ini masih banyak belum dilaksanakan dan diperkirakan mungkin punya potensi untuk digali seperti pajak pembangunan yang menjulang tinggi, pajak pelabuhan perahu, pajak rumah, penginapan, retribusi pelelangan ikan, retribusi pemberian izin pengusahaan tambak ditepi pantai, dan lain-lain sebagainya. Sudah barang tentu segala usaha untuk mengadakan usaha ekstensifikasi pemungutan pendapatan asli daerah, perlu didahului dengan inventarisasi dan penelitian seperlunya serta melalui prosedur perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka melaksanakan intensifikasi pemungutan sasaran dan upaya teknis yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Peningkatan pelaksanaan pemungutan
  2. Peningkatan personil
  3. Peningkatan sarana pungutan
  4. Peningkatan kesadaran membayar pajak dan retribusi
- peningkatan pelaksanaan pungutan dapat dicapai dengan cara :

- a. Agar dapat menjangkau semua objek pungutan, sehingga diharapkan tidak ada yang lolos dan dapat ditangani dengan jalan :
1. Membagi wilayah pungutan menjadi wilayah kerja
  2. Mengadakan pengkhususan/spesialisasi pelayanan dengan jenis pungutan yang ditangani.
  3. Mengadakan pemungutan pelayanan dalam arti, pungutan atas objek pajak, retribusi yang semula ditangani oleh beberapa kesatuan kerja bersama dengan jenis pungutan lain, kemudian pelaksanaan pemungutan dipusatkan pada suatu tempat.
- b. Agar dapat menjangkau dengan cepat dan tepat waktunya menangani objek baru, dapat ditempuh dengan cara :
1. Mempersempit antara kemampuan mengamati dengan wilayah kewenangannya dan membatasi jangkauan pengamatan dan membenahan target relatif berat, akan mendorong petugas untuk berusaha mencari setiap objek pemungutan, dengan demikian dapat diharapkan meningkat penerimaan maksimal.
  2. Meningkatkan tugas-tugas lapangan dengan jalan meningkatkan pemberian penjelasan dan penerangan kepada masyarakat tentang pemungutan pajak, retribusi daerah.
  3. Mengadakan pembinaan terpadu kepada masyarakat, seperti penyuluhan peningkatan produksi pertanian, perkebunan komoditi ekspor, perikanan ( tambak udang, ikan dan lainnya ), penegakan

fungsi koperasi (pemasaran hasil produksi yang dicapai), dan lain sebagainya

Menyangkut peningkatan pelaksanaan petugas pemungutan pajak dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Diadakan pembinaan mental dan disiplin secara terus menerus, sehingga menghasilkan kualitas petugas yang mendahulukan kepentingan dinas daripada kepentingan pribadi.
- b. Dilaksanakan peningkatan tertib kerja, sehingga setiap gerak dari petugas akan mampu menghasilkan pencapaian dan peningkatan pemasukan uang dari sektor swasta ke sektor pemerintah.
- c. Melakukan usaha pengetahuan dan kecakapan bagi para petugas sesuai dengan bidangnya.
- d. Mengusahakan keseimbangan antara tugas, sarana kerja dan potensi personal (individu petugas lapangan).

Dalam usaha meningkatkan pendapatan asli daerah guna peningkatan kemampuan atau kualitas daerah, selain mengadakan intensifikasi pajak, retribusi daerah, juga dilaksanakan ekstensifikasi yakni mengadakan pengendalian sumber-sumber baru yang merupakan kewenangan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Selain potensi-potensi yang telah dikembangkan dan yang dapat dikembangkan tapi belum mampu menghasilkan untuk sumber

keuangan daerah, maka perlu kiranya dikembangkan potensi-potensi lain yang belum dikembangkan. Untuk itu, pengembangan pungutan atas Pajak dan Retribusi Daerah telah dikembangkan pula di kabupaten pinrang. Utamanya, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

Inilah beberapa jalan keluar yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Pinrang dalam usaha meningkatkan sumber pendapatan asli daerah, sebagai tolak ukur kemampuan daerah atau dapat disebut kualitas otonominya, guna menunjang pembangunan daerah itu sendiri, sehingga pemerataan pembangunan disegala bidang dapat terlaksana dengan baik.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan pada bab-bab terdahulu, pada bagian akhir skripsi ini kembali secara singkat hasil-hasil yang dicapai pada penelitian ini. Untuk itu penulis dapat mengembangkan beberapa kesimpulan antara lain :

1. Kemampuan aparat Dinas Pendapatan Daerah dalam Penetapan Target Pendapatan asli Daerah di Kabupaten Pinrang khususnya di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :
  - a. Latar belakang pendidikan, Dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan ditinjau dari tingkat pendidikan dengan keterampilan yang dimiliki maka pekerjaan terasa cukup mudah, hal ini mempengaruhi penetapan target pendapatan asli daerah sebagai bagian dari pengelolaan pendapatan asli daerah.
  - b. Jumlah atau kuantitas aparat, ditinjau dari dari jumlah atau kuantitas aparat aparat masih kurang dan belum memadai.
  - c. Usia dan Masa kerja, ditinjau dari usia dan masa waktu kerja aparat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang yaitu sudah cukup berpengalaman dalam penetapan target pendapatan asli daerah Dalam hal ini pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD).
  - d. Kesesuaian penempatan aparat dengan disiplin ilmu yang dimiliki, ditinjau dari kesesuaian penempatan aparat dengan disiplin ilmu yang



dimiliki sudah sesuai. Hal ini, dapat menjamin efektifitas dan efisiensi serta kualitas kerja yang baik.

2. Faktor yang mempengaruhi penetapan target PAD, yaitu :
  - a. Sarana dan Prasarana yang tersedia, sarana dan prasarana yang masih kurang memadai hal ini dapat mempengaruhi penetapan target pendapatan asli daerah dalam hal ini, yaitu penetapan pendapatan asli daerah.
  - b. Sistem atau cara penetapan target, bersifat periodikal sesuai dengan ketentuan yang ada.
  - c. Volume pekerjaan, dipengaruhi oleh kurangnya fasilitas penunjang dalam melaksanakan tugas.
  - d. Kesejahteraan aparat, sudah cukup memadai dilihat dari hasil upah pungut dan penghasilan kerja (gaji).
3. Semua pemungutan Daerah Kabupaten Pinrang telah mempunyai landasan/dasar hukum.

## 5.2. Saran-saran

1. Untuk lebih meningkatkan kemampuan aparat Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Pinrang dalam penetapan target pendapatan hasil daerah, maka langkah yang perlu ditempuh adalah dengan mengadakan berbagai latihan dan pendidikan secara berkesinambungan dalam peningkatan pengetahuan, mutu, dan keterampilan aparat sesuai dengan bidang kerja masing-masing.
2. Pemerintah Daerah khususnya aparatur Dinas Pendapatan Daerah dalam menempatkan setiap personil pada kerja masing-masing senantiasa memperlihatkan kualifikasi keilmuan atau keahlian yang dimiliki oleh setiap aparat agar mereka dapat bekerja secara profesional dan penuh rasa tanggung jawab.
3. Pemerintah Daerah harus senantiasa memperhatikan sarana dan prasarana sebagai kelengkapan yang dapat membantu dan mempermudah aparat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
4. Perlu adanya pengelolaan sumberdaya alam secara profesional agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai pendukung utama dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah demi tercapainya masyarakat adil dan makmur.
5. Melakukan pembinaan tertib administrasi PAD melalui kegiatan pengawasan fungsional oleh Itwilkab Pinrang, pengawasan melekat pada setiap instansi/unit kerja, penyuluhan dilakukan secara terpadu dengan instansi/unit kerja yang terkait.

## DAFTAR KUTIPAN

1. Ateng Syafruddin. "pengaturan koordinasi pemerintahan di Daerah (edisi kedua)". PT Cipta Aditya Bhakti, Bandung, 1993
2. Bayu Suryaningrat. "Desentralisasi dan Dekonsentrasi pemerintahan di Indonesia.(suatu Analisis)". Dewa Ruci Press, Jakarta, 1980.
3. J. Wayong. "Asas dan Tujuan Pemerintahan Daerah". Djambatan, Jakarta 1975.
4. Kansil. C.S.T. "Pokok-Pokok Pemerintahan Pusat dan daerah di Indonesia". Bina Aksara, Jakarta, 1984.
5. Ketetapan MPR No. 11 Tahun 1998 Tentang GBHN, BP-7 Pusat, Jakarta, 1993.
6. M. Solly Lubis. "Perkembangan Garis pOlitik dan Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah". Alumni, Bandung, 1983.
7. Pamudji. S. "Kepemimpinan dalam Pemerintahan". Rajawali Press, Jakarta, 1990.
8. Rochmat Sumitro. " Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pendapatan". Cetakan IX Erasco, Jakarta,1979.
9. Soewarno Handyaningrat. " Administarsi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional". PT Gunung Agung, Jakarta, 1995
10. Suwardjoko Warpani. " Analisis Kota dan Daerah". ITB, Bandung, 1980.
11. Talizidhuhu Ndraha. "Metodologi Pemerintahan Indonesia". Bina Aksara, Jakarta, 1981.
12. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, BP-7 Pusat, Jakarta, 1993.
13. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 1999
14. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
15. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
16. Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 1997
17. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 1974
18. W.J.S. Poerwadarminto. " Kamus Bahasa Indonesia". Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
19. Yosef Riwu Kaho. " Prosfek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia". Rajawali Press, Jakarta, 1991.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU TEKS

- Abdullah R, S.H., 2005. Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Gie, The Liang, Administrasi Perkantoran Moderen, Radya Indra, Yogyakarta, 1980
- Handyaningrat, Soewarno, Adm,instrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional, Gunung Agung, Jakarta, 1995
- Ibrahim, Jimmi Mohammad, Prospek otonomi Daerah, Dahara Prise, Jakarta, 1990.
- Kaloh, J, DR., 2002. Mencari Bentuk Otonomi Daerah. PT. Asdi Mahasatya, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Lubis, Solly, M, Perkembangan Garis politik dan Perundang-undangan Pemerintah Daerah, Alumni Bandung, 1983.
- Munasef, sistem pemerintahan Di Indonesia, Gunung agung, Jakarta, 1987.
- Pamudji, S, Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1984
- Soejito, Irawan, Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Bina Aksara, Jakarta, 1984
- Soemitro, Rochmad, Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pendapatan, Eresco, Jakarta, 1979
- Suryaningrat, Bayu, Drs, Desentralisasi dan Dekonsentrasi Pemerintahan di Indonesia, Dewa Ruci Press, Jakarta, 1980
- Syafiie, Inu Kencana, Pengantar Ilmu Pemermtahan, Eresco, Jakarta, 1985
- Syafruddin, Ateng, Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Tjahja, Supritana, Sistem Administrasi Pemerintahan di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1993
- Warfani, Sudjarwoko, Analisis Kota Dan Desa, ITB, Bandung, 1980

Wayong, J, Azas dan Tujuan Pemerintahan Daerah, Djawatan, Jakarta, 1975

Widjaja, A. W, Administrasi Kepegawaian, Rajawali Press, Jakarta, 1990

## **B. BUKU METODOLOGI**

Amirin, Tatang, Menyusun Rencana Penelitian, CV. Rajwali, Jakarta, 1990

Nawawi, Hadari, Metode penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University press, Yogyakarta, 1983

Singarimbun, Masri Dan Effendi, Sofyan, Metode Penelitian Survey. LP3ES, Jakarta, 1989

## **C. DOKUMEN-DOKUMEN**

UUD 1945, P4, GBHN, BP-7 Pusat, Jakarta, 1993

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

Undang-Undang No 22 Tahun 1999 Tentang *Pemerintahan daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*, Citra Umbara, Bandung, 2004

Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang *perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah*, Citra Umbara, Bandung, 2004

Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 1997

Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Departemen dalam Negeri, 1974

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**BUKU KODE**



**BUKU KODE**

No	No Variabel	Variabel	kode
1	V.1	<b>L. IDENTITAS RESPONDEN</b> Usia/ Umur <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt; 30</li> <li>• 31-40</li> <li>• 41-50</li> <li>• &gt;51</li> </ul>	1 2 3 4
2	V.2	Tempat Lahir <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pinrang</li> <li>• Sidrap</li> <li>• Pare-pare</li> <li>• Polmas</li> <li>• Makassar</li> <li>• Diluar Sulawesi</li> </ul>	1 2 3 4 5 6
3	V.3	Pendidikan terakhir Anda ? <ul style="list-style-type: none"> <li>• SD</li> <li>• SMP</li> <li>• SMU</li> <li>• DIPLOMA</li> <li>• S1</li> <li>• S2</li> </ul>	1 2 3 4 5 6
4	V.4	Jenis kelamin : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laki-laki</li> <li>• Perempuan</li> </ul>	1 2
5	V.5	Suku Bangsa <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bugis</li> <li>• Makassar</li> <li>• Lain-lain</li> </ul>	1 2 3
6	V.6	Agama <ul style="list-style-type: none"> <li>• Islam</li> <li>• Kristen Katolik</li> <li>• Kristen Protestan</li> </ul>	1 2 3
7	V.7	Status perkawinan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum kawin</li> <li>• Kawin</li> <li>• Janda/duda</li> </ul>	1 2 3

8	V. 8	Jumlah Tanggungan <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 orang</li> <li>• &lt; 3 orang</li> <li>• &gt; 3 orang</li> </ul>	1 2 3
9	V. 9	Pekerjaan Sampingan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Petani Sawah</li> <li>• Petani Tambak</li> <li>• Kebun</li> <li>• Dagang</li> </ul>	1 2 3 4
10	V. 10	Penghasilan Perbulan <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt;1.000.000</li> <li>• 1.100.000-1.500.000</li> <li>• 1.600.000-2.000.000</li> <li>• &gt;2.100.000</li> </ul>	1 2 3 4
11	V. 11	Status Kepangkatan dan Golongan dalam pekerjaan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembina</li> <li>• Penata Tk.1</li> <li>• Penata</li> <li>• Penata Muda Tk.1</li> <li>• Penata Muda</li> <li>• Pengatur Tk.1</li> <li>• Pengatur</li> <li>• Pengatur muda Tk.1</li> <li>• Pengatur Muda</li> <li>• Juru Tk.</li> </ul>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12	V.12	Pelatihan/kursus yang pernah Diikuti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komputer</li> <li>• Peningkatan Pungutan Pajak</li> <li>• Penataran Sekcam</li> <li>• Penataan system jaringan dokumentasi dan informasi</li> <li>• Seskalak</li> <li>• Adum</li> <li>• Adumla</li> <li>• Sepadya</li> <li>• Lainnya .....</li> </ul>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
13	V. 13	<b>Tingkat Kemampuan Aparat Dinas Pendapatan daerah dalam Penetapan target Pendapatan Asli Daerah</b>	

		<p>Masa Kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt; 10 Tahun</li> <li>• &gt; 10 Tahun</li> </ul>	<p>1</p> <p>2</p>
14	V. 14	<p>Waktu Tersedia untuk mengerjakan Pekerjaan ?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pekerjaan banyak, waktu sedikit</li> <li>• Pekerjaan cukup banyak, waktu kurang</li> <li>• Pekerjaan kurang, waktu sedikit</li> <li>• Pekerjaan dan waktus sesuai</li> </ul>	<p>4</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p>
15	V.15	<p>Dibandingkan pengetahuan dan keterampilan yang anda miliki?</p> <p>a. kemampuan saya terlalu tinggi untuk pekerjaan ini</p> <p>b. pekerjaan terasa cukup mudah</p> <p>c. pekerjaan terasa sulit</p> <p>d. pekerjaan terasa amat sulit</p>	<p>4</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p>
16	V. 16	<p>Tingkat pendidikan formal yang dimiliki sekarang sudah cukup untuk mendukung tugas-tugas yang dibebankan ?</p> <p>a. Sangat cukup</p> <p>b. Cukup</p> <p>c. Kurang cukup</p> <p>d. Tidak cukup</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p>
17	V. 17	<p>Pelayanan yang anda berikan selama ini sudah sesuai dengan keinginan masyarakat?</p> <p>a. Sangat sesuai</p> <p>b. Cukup sesuai</p> <p>c. kurang sesuai</p> <p>d. tidak sesuai</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p>
18	V. 18	<p>Dibandingkan jumlah aparat dengan volume pekerjaan ?</p> <p>a. jumlah aparat banyak, volume pekerjaan terlalu sedikit</p> <p>b. jumlah aparat cukup banyak, volume pekerjaan kurang</p> <p>c. jumlah aparat kurang, volume pekerjaan kurang</p> <p>d. jumlah aparat dan volume pekerjaan sesuai banyaknya</p>	<p>4</p> <p>3</p> <p>2</p> <p>1</p>

19.	V. 19	<p><b>Faktor yang mempengaruhi penetapan target pendapatan asli daerah.</b>  Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan dan penetapan target pendapatan asli daerah?</p> <p>a. Sangat memadai  b. memadai  c. Kurang Memadai  d. Tidak Memadai</p>	<p>1  2  3  4</p>
20.	V. 20	<p>Dibandingkan Fasilitas untuk Dinas Luar dengan Volume Pekerjaan ?</p> <p>a. jumlah fasilitas terlalu banyak, volume pekerjaan terlalu sedikit  b. jumlah fasilitas cukup banyak, volume pekerjaan kurang  c. jumlah fasilitas kurang, volume pekerjaan cukup banyak  d. jumlah fasilitas dan volume pekerjaan sesuai banyaknya</p>	<p>4  3  2  1</p>
21.a	V. 21	<p>Apakah anda paham tentang system perencanaan dan penetapan target pendapatan asli daerah</p> <p>a. sangat paham  b. cukup paham  c. kurang paham  d. tidak paham</p>	<p>1  2  3  4</p>
21.b	V. 22	<p>penjelasannya ...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• mengajukan rencana target kepada panitia anggaran</li> <li>• diadakan penelitian terhadap subjek dan objek pajak</li> <li>• harus ada aturan, kemudian mendata sesuai potensi pad yang dimiliki daerah</li> <li>• tim penyusun anggaran, mengundang instansi pengelola untuk menyampaikan rencana target, selanjutnya rencana target diserahkan ke DPRD untuk disahkan dala rapat anggaran.</li> </ul>	<p>1  2  3  4</p>
22.	V. 23	<p>Proses perencanaan dan penetapan target PAD oleh Dispenda ?</p> <p>a. Transparan  b. Cukup Transparan  c. Kurang Transparan  d. Tidak Transparan</p>	<p>1  2  3  4</p>

23.	V. 24	Proses penyelesaian perencanaan dan penetapan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan? a. Terpenuhi b. Cukup terpenuhi c. Kurang terpenuhi d. Tidak terpenuhi	1 2 3 4
24	V. 25	Rencana yang telah disusun diberitahukan kepada seluruh pihak yang berkepentingan terhadap rencana tersebut ? a. selalu b. Kadang-kadang c. Tidak Pernah	1 2 3
25	V. 26	Data dan informasi yang dibutuhkan tersedia dalam penyusunan perencanaan target Pendapatan Asli Daerah ? a. Tersedia b. Cukup tersedia c. Kurang tersedia d. Tidak Tersedia	1 2 3 4
26	V. 27	Pelaksanaan permintaan dan penyampaian data, informasi atau laporan oleh Dispenda terhadap dinas/ Instansi terkait ? a. Terlaksana b. Cukup terlaksana c. Kurang Terlaksana d. Tidak Terlaksana	1 2 3 4
27	V. 28	Hubungan antara atasan dan bawahan di Kantor Dispenda ? a. Baik b. Cukup baik c. Kurang baik d. Tidak baik	1 2 3 4
28.	V. 29	Atasan tegas dalam melakukan pengawasan kerja ? b. Sangat tegas c. Cukup tegas d. Kurang tegas e. Tidak tegas	1 2 3 4

29.	V. 30	Apakah pihak pimpinan mengadakan pe-motivasian terhadap aparat perencana dalam melaksanakan tugasnya ? a. Sering b. Cukup sering c. Kadang-kadang d. Tidak pernah	1 2 3 4
30.	V. 31	fasilitas yang ada di kantor untuk pekerjaan rutin dengan volume pekerjaan ? a. jumlah fasilitas terlalu banyak, volume pekerjaan terlalu sedikit. a. Jumlah fasilitas cukup banyak, pekerjaan kurang b. Jumlah fasilitas kurang, volume pekerjaan cukup banyak c. Jumlah fasilitas dan volume pekerjaan sesuai banyaknya.	1 2 3 4
31.	V.32	Tingkat kesejahteraan keluarga dari penghasilan kerja kerja yang anda dapatkan ? a. Sangat memadai b. Memadai c. Kurang memadai d. Tidak memadai	1 2 3 4
32	V. 33	Suasana di tempat kerja? a. Sangat menyenangkan b. menyenangkan c. kurang menyenangkan d. tidak menyenangkan	1 2 3 4
33.	V. 34	Kepuasan upah pungut yang anda peroleh selama ini ? a. sangat memuaskan b. cukup memuaskan c. kurang memuaskan d. tidak memuaskan	1 2 3 4